

**DESA LENTU KECAMATAN BONTORAMBA
KABUPATEN JENEPONTO (1991-2015)**

S K R I P S I



LOLA VITALOKA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

**DESA LENTU KECAMATAN BONTORAMBA
KABUPATEN JENEPONTO (1991-2015)**

S K R I P S I

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan

**LOLA VITALOKA
1262042010**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan surat persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor : 5056/UN.36.6/DL/2016 untuk membimbing saudara:

Nama : Ariesta Adepati

NIM : 1262041019

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Judul Skripsi : **Orang Bali di Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara (1977-2014)**

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan dapat diajukan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Makassar, 22 November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. M. Rasyid Ridha, M.Hum
NIP. 19610317 198601 1 002

Dr. Jumadi, M.si.
NIP. 1973021 200212 1 014

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, dengan SK Dekan Nomor /UN36.6/KM/2016 tanggal Agustus 2016, untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada Hari Kamis Tanggal 21 Juli 2016.

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar

Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. Hum.
NIP. 19671231 199303 1016

Panitia Ujian:

1. Ketua : Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. Hum. (.....)
2. Sekertaris : Dr. Najamuddin, M. Hum (.....)
3. Pembimbing I : Dr. Patahuddin, M. Pd (.....)
4. Pembimbing II: Drs. H. Muh. Saleh Madjid, M.Pd (.....)
5. Penguji I : Dr. Najamuddin, M. Hum (.....)
6. Penguji II : Dr. H. Muh. Rasyid Ridha, M. Hum (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lola Vitaloka
NIM : 1262042010
Tempat/Tanggal Lahir : Ta'binjai 10 Juni 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Jurusan : Pendidikan Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah (S1)
Judul Skripsi : **Desa Lentu Kecamatan Bontoramba
Kabupaten Jeneponto (1991-2015)**
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Patahuddin, M.Pd
2. Drs. H. Muh. Saleh Madjid, M.Pd

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat.

Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidak benaran, maka saya bersedia dituntut di dalam/ luar pengadilan dan menanggung segala resiko dan akibatnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 November 2016

Diketahui oleh :

Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah

Yang Membuat Pernyataan

Dr. Patahuddin, M.Pd
NIP.19641231 199003 1 003

Lola Vitaloka
NIM. 1262042010

MOTTO

Berusaha dan bekerja keras, tetap sabar dalam hal apapun..

Berdo'a dan Tawakkal kepada ALLAH SWT

Adalah kunci meraih keberhasilan..

Ku persembahkan Karya ini.....

Untuk Kedua orang tua, kakak-kakakku tercinta yang selalu menjadi alasan untuk terus bertahan apapun yang aku alami.

Seluruh keluarga, serta teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Terima Kasih Bapak, Mama, Kakak-kakakku, seluruh keluarga, dan teman-teman...

Semoga Allah selalu melindungi...

ABSTRAK

Lola Vitaloka, 2016. *Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto (1991-2015)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Patahuddin dan H. Muh. Saleh Madjid.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang terbentuknya Desa Lentu, perkembangan Desa Lentu, dan dampak terbentuknya Desa Lentu pada masyarakat umumnya dan pada masyarakat khususnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik (mencari dan pengumpulan sumber), kritik sumber (kritik ekstern dan kritik intern), interpretasi (penafsiran sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan (wawancara) dan pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan latar belakang terbentuknya Desa Lentu yaitu adanya pemekaran pada tahun 1991 yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kelurahan Bontoramba. Dengan terbentuknya Desa Lentu maka seiring dengan berjalannya pemerintahan Desa Lentu mengalami perkembangan baik dalam system pemerintahan, perkembangan pemukiman, penduduk dan infrastruktur sosial serta perekonomian yang setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 1991-2015. Dengan adanya perkembangan maka terdapat pula pengaruh yang ditimbulkan dalam pemebentukan desa yaitu mempercepat pelayanan untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan terbentuknya Desa Lentu pada tahun 1991-2015 telah mengalami kemajuan diberbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan pertanian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya baik kesehatan, maupun kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dimana merupakan salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Berbagai cobaan dan tantangan dalam proses penyusunan karya ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ataupun materinya didalam membantu mewujudkan Penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati melalui lembaran ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga apa yang telah diberikan mendapatkan pahala dan mudah-mudahan dikemudian hari dapat membalasnya meskipun itu tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan. Adapun pihak-pihak yang dimaksud diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP, selaku Rektor Universitas Negeri Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum, dan jajarannya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, atas sumbangsinya baik itu dukungan moril maupun bantuan dalam menyelesaikan administrasi dalam penelitian ini.
3. Ketua dan Sekertaris program studi Pendidikan Sejarah FIS UNM tempat dimana penulis menimba ilmu yaitu Bapak Dr. Patahuddin, M.Pd, dan Bapak

Dr. Muh. Rasyid Ridha, M.Hum yang telah memberikan layanan akademis kepada penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah.

4. Dr. Patahuddin, M.Pd selaku pembimbing I yang telah banyak membantu baik dari segi materil maupun memberikan petunjuk, nasehat, memotivasi serta membimbing dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Drs. H. Muh. Saleh Madjid, M.Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan petunjuk, motivasi, serta membimbing dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Dr. Najamuddin, M. Hum selaku penanggap I dan Dr. H. Muh. Rasyid Ridha, M. Hum selaku penanggap II yang telah banyak memberikan tanggapan, masukan, dan dorongan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Sejarah dan dosen yang ada di UNM yang pernah mengajar penulis.
8. Bupati Jenepono, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaranya yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian.
9. Kepada para informan yang sudah banyak membantu dalam pengumpulan data.
10. Seluruh Guru yang pernah mengajar penulis baik itu dibangku TK, SD, SMP, maupun SMA.
11. Sahabat-sahabatku Halilintar Mumut, Adhe, Risda, Iis, Riri, dan Dhea, yang telah memberikan motivasi dan dorongan baik selama menempuh studi maupun dalam penyusunan penelitian ini.

12. Kawan-kawan seperjuangan Pendidikan Sejarah, terkhusus angkatan 2012 yang telah bersama penulis baik dalam keadaan susah maupun bahagia.
15. Ucapan terima kasih terkhusus penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda Baktiar Patau dan Ibunda St. Rabiah serta saudara-saudaraku tercinta, yang telah memberikan bantuan, baik dalam bentuk materi, dukungan maupun doa yang akan menuntun pada jenjang kesuksesan. Bantuan dan kebaikan mereka tulus, tentu tidak dapat dibalas dengan ucapan terima kasih, mudah-mudahan Allah SWT membalas jasa dan kebaikan mereka.

Penulis telah berusaha seoptimal mungkin untuk menghadirkan karya terbaik, namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka tidak tertutup kemungkinan apabila terdapat kesalahan dalam menyusun penelitian ini. Olehnya itu, mengharapakan saran dan kritikan dalam upaya pengembangan diri di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Jualah memohon do'a semoga dukungan, arahan, bantuan dari berbagai pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Makassar, November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10
BAB II. GAMBARAN UMUM DESA LENTU KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO.....	15
A. Keadaan Geografis	15
B. Keadaan Demografi.....	16
C. Latar Belakang Terbentuknya Desa Lentu	24
BAB III. PERKEMBANGAN DESA LENTU KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO	30
A. Pemerintahan.....	30
B. Kondisi Sosial Budaya.....	36
C. Keadaan Ekonomi.....	38
D. Infrastruktur Sosial.....	48

BAB IV. DAMPAK TERBENTUKNYA DESA LENTU KECAMATAN BONTORAMBA PADA UMUMNYA & MASYARAKAT DESA PADA KHUSUSNYA.....	57
A. Bagi Masyarakat Desa Lentu.....	57
B. Bagi Pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten.....	60
BAB V. KESIMPULAN & SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR INFORMAN	70
LAMPIRAN	72
RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Jumlah Penduduk Desa Lentu.....	15
2.2	Jumlah Rumah Panggung, Semi Permanen dan Permanen Desa Lentu perbandingan antara tahun 1998- 2015.....	18
2.3	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan dari Tahun 1999-2015.....	20
2.4	Daftar Nama Kepala Desa Lentu.....	25
3.1	Pola Penggunaan Tanah Masyarakat Desa Lentu.....	37
3.2	Keadaan Pendidikan di Desa Lentu.....	47
3.3	Akses Masyarakat Pemanfaatan Sumber Air Bersih.....	49
3.4	Kepemilikan Jamban Keluarga Masyarakat Desa Lentu.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Usulan Judul Skripsi.....	68
2.	Pengesahan Judul Skripsi dan Pembimbing.....	69
3.	Permintaan Izin Penelitian.....	70
4.	Izin Penelitian	71
5.	Izin Penelitian Dari Desa.....	72
6.	Izin Penelitian dari BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan.....	73
7.	Dokumentasi.....	74

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Negara Republik Indonesia dinyatakan merdeka, maka bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan membuat peraturan yang berasaskan pada UUD 1945. Dalam UUD 1945 diatur tentang sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri¹. Maka dari itu dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya, yang ditetapkan dengan undang-undang.²

Terbentuknya desa sebagai tempat tinggal kelompok terutama disebabkan karena naluri alamiah untuk mempertahankan kelompok. Dalam kelompok tersebut terjalin sendi-sendi yang melandasi hubungan antara sesama warga kelompok berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, karena tinggal dekat dan karena kesamaan kepentingan.³

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

¹Tabagus Ronny Rahman Nitibaskara. *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah*. (Jakarta: Peradaban, 2002), hlm 157

²Haw Widjaja, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

³Madya Alip, *Fenomena Terbentuknya Kampung Kota oleh Masyarakat Pendatang Spontang*, (Medan: CV. Surya Putra Panca Mandiri, 2009), hlm. 3.

dalam sistem Pemerintahan Indonesia (Pasal 1 Ayat 12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manusia tidak lagi dianggap sebagai faktor produksi tetapi lebih dianggap sebagai asset organisasi yang penting.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Disamping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani.

Desa juga merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam pembentukan desa harus memenuhi unsur-unsur yang dapat mendukung terbentuknya sebuah desa. Pendukung

⁴Muhammad Yamin, Dkk. *System Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Sulawesi Selatan*. (Ujung Pandang: Departemen Pendidikan & Kebudayaan 1990), hlm. 5.

terbentuknya desa dapat dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah (daerah), sosial budaya dan tata kehidupan di setiap daerah. Dengan adanya pendukung tersebut maka dapat dilihat daerah yang layak menjadi sebuah desa.

Daerah otonom mempunyai kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah yang dimaksud adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah yang memungkinkan adanya ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas yang efisien dan efektif.⁵

Pada Pasal 13 ditegaskan, bahwa pemekaran daerah dapat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut : 1. Kemampuan ekonomi, 2. Potensi daerah, 3. Sosial budaya, 4. Jumlah Penduduk, 5. Luas daerah, 6. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.⁶

Unsur-unsur yang perlu dipenuhi oleh satu kesatuan hidup untuk dapat dikatakan sebuah desa yaitu minimal jumlah penduduknya 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga (penduduk), luas wilayah daerah, sosial budaya yang dimiliki daerah setempat, potensi desa yang dapat dikembangkan dan sarana prasarana pemerintahan (tata kehidupan).⁷ Dengan adanya unsur pembentukan desa maka tidak serta merta

⁵ Laila Sabeita El Fitri, dkk. Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Malang: Universitas Brawijaya, Volume 1 No. 3, hlm. 6.

⁶ Murtir Jeddawi, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm 24.

⁷ Darmawan Salman. *Sosiologi Desa Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*, (Makassar: Inninawa, 2012), hlm. 187.

pembentukan desa dapat dilakukan begitu saja tanpa melihat unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Undang-Undang yang membahas mengenai Pembentukan Desa adalah UU No. 2 Bab 2 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengembangan Desa Pasal 6 Ayat 2.⁸ Dari unsur penduduk dan tata kehidupan seperti disebutkan di atas menunjukkan keharusan adanya pemimpin yang mengatur ketertiban masyarakat berdasarkan nilai-nilai dan tata kehidupan yang telah disepakati bersama.

Pembangunan adalah bagian yang sangat wajib dilakukan dalam suatu wilayah baik pusat, daerah maupun desa. Oleh karena itu pembangunan harus dirancang sedemikian rupa agar mencapai sasaran yang sesuai dengan arah pembangunan nasional serta diarahkan agar mampu menghasilkan keluaran (output) yang merata dan adil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai sumber daya atau potensi yang ada pada wilayah desa tersebut.

Untuk mencapai tujuan pembangunan desa adalah mendesain sebuah perencanaan yang konferensif. Oleh karena itu, pemerintah mendesain perencanaan mulai tingkat pusat, daerah sampai tingkat desa⁹. Setiap desa memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan yang lain. Ada beberapa desa yang muncul karena daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan ada juga yang lahir karena daerah tersebut memiliki sungai yang besar yang bisa dijadikan sebagai

⁸ *Ibid*, hlm. 197.

⁹ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)* Desa Lentu Kec. Bontoramba Tahun 2015. Hlm.1

lalu lintas yang dapat menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, berdirinya suatu desa membutuhkan proses yang lama.¹⁰

Pembangunan dan pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan desa yang berlokasi di Kabupaten Jeneponto dengan cakupan beberapa kawasan kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto. Kawasan tersebut dirancang untuk mensinergikan berbagai program pembangunan lintas sektor dan melibatkan beberapa departemen terkait, guna mendorong dan mempercepat pembangunan kawasan perdesaan yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, terdesentralisasi, berkelanjutan dan difokuskan gerakan masyarakat pertanian dan fasilitas pemerintah. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah kabupaten Jeneponto merancang perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah selama enam tahun.

Sejarah yang fokus kajiannya membahas tentang sejarah desa bukanlah hal yang pertama kali dilakukan. Penulisan sejarah desa dalam kurung waktu tertentu tidak kalah menarik dibandingkan kajian yang pembahasannya lebih luas dan sejarah temati seperti sejarah politik, sejarah sosial-ekonomi, dan lain-lain. Banyak kajian sejarah yang sifatnya subjektif yaitu lebih menonjolkan aspek-aspek positif dibanding realitas sejarah yang sebenarnya.

¹⁰ Adisasmita, *Perencanaan Pembangunan Perdesaan Menggunakan Pendekatan Partipatif*, (Jakarta selatan: Gagas Media, 2001), hlm. 7

Untuk mencapai visi daerah strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Jeneponto membuat kebijakan kepada seluruh desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan roda pembangunan pada seluruh program yang akan dilaksanakan di tingkat desa. Oleh karena itu proses penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Menengah Desa Lentu betul-betul sesuai dengan potensi dan kebutuhan warga masyarakat sehingga dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.

Setiap desa memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan yang lain. Ada beberapa desa yang muncul karena daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan ada juga yang lahir karena daerah tersebut memiliki sungai yang besar yang bisa dijadikan sebagai lalu lintas yang dapat menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Sama halnya dengan Desa Lentu yang terbentuk dengan memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Bontoramba, wilayah Desa Lentu terdiri atas dataran rendah, disamping tempat pemukimn penduduk juga merupakan lahan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat serta budaya yang masih sangat kental dengan kerja sama di segala bidang.

Letak Desa Lentu sangat strategis karena merupakan jalur lintas transpor, sehingga masyarakat Desa Lentu dalam memasarkan hasil buminya lebih mudah dan dekat melalui Kota Jenepono. Jarak Desa Lentu dari Ibu Kota Kecamatan 2 Km,

Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Jeneponto 15 Km, dan jarak dari Ibu Kota Provinsi 62 Km, dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua.¹¹

Keterkaitan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan merupakan landasan dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan perkotaan dan pedesaan dalam pembangunan jangka panjang.¹² Tujuan pelayanan umum kawasan ekonomi pengembangan desa adalah peningkatan pelayanan infrastruktur pada kawasan pusat pengembangan desa dengan mempercepat pertumbuhan pedesaan melalui komoditi unggulan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pengembangan ekonomi lokal di pedesaan.

Dengan demikian kawasan pedesaan menjadi sangat penting yang artinya tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan perkotaan dimana desa berfungsi sebagai produsen dan kota sebagai konsumen itu terlihat dari hasil bumi yang ada di Desa Lentu yang didistribusikan ke Kota Makassar seperti padi, lombok, kelapa, dan jagung kuning/putih.

Dari uraian di atas menggambarkan bagaimana Desa Lentu berperan dalam berbagai bidang untuk memajukan pembangunan dengan potensi yang luar biasa, baik dari segi pertaniannya. Maka dengan alasan itulah penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “*Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 1991-2015*”.

¹¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Lentu Kec. Bontoramba, Tahun 2015. Hlm. 21

¹² Budiarjo. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*, (Bandung: Yrama Widya, 1997), Hlm. 21.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan penelitian dan penulisan selama periode 1991-2015 skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 1991-2015?
2. Bagaimana perkembangan masyarakat Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 1991-2015?
3. Bagaimana dampak terbentuknya Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto terhadap masyarakat Kecamatan Bontoramba pada umumnya dan masyarakat Desa Lentu pada khususnya.

C. Batasan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan, baik secara tematis, spasial, maupun temporal. Hal ini agar cakupan dilakukan tulisan lebih terarah pada titik persoalan yang dikaji.

Secara tematis, penulisan ini masuk pada kategori Sejarah Sosial dan Sejarah Ekonomi karena unit analisis yang dikaji adalah masyarakat desa yang fokus kajiannya berorientasi pada latar belakang terbentuknya Desa Lentu, perkembangan masyarakat di Desa Lentu serta dampak terbentuknya Desa Lentu terhadap masyarakat Kecamatan Bontoramba pada umumnya dan masyarakat Desa Lentu pada khususnya. Batasan spasial penulis fokus pada Desa Lentu yang berada diwilayah

administratif Kabupaten Jeneponto sehingga permasalahan dapat lebih mudah diungkap dengan jelas.

Batasan temporal yaitu periode pada tahun 1991-2015. Tahun 1991 dijadikan sebagai waktu awal pemerintahan karena pada tahun tersebut dimulai berjalannya pemerintahan Desa Lentu. Adapun tahun 2015 sebagai batasan akhir karena pada tahun ini masyarakat benar-benar sudah mengalami perkembangan yang cukup maju baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta dalam pendidikan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada berbagai masalah yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah sebelumnya, maka beberapa tujuan masalah yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada tahun 1991-2015.
2. Untuk mengetahui perkembangan masyarakat Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada tahun 1991-2015
3. Untuk mengetahui dampak terbentuknya Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto terhadap masyarakat Kecamatan Bontoramba pada umumnya dan masyarakat Desa Lentu pada khususnya.

E. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji masalah yang relevan.
2. Memberi informasi tentang kondisi fotografi Desa Lentu.
3. Memberi informasi tentang kondisi masyarakat Desa Lentu.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Secara sistematis dan menilainya secara kritis serta mengajukan sintesis secara tertulis. Penelitian sejarah adalah suatu penelitian yang dilakukan dimaksud mengetahui ikhwal kejadian-kejadian yang telah berlangsung pada masa lampau. Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder dengan tahapan kerja : heuristik (pengumpulan data), kritik (evaluasi data), intrepertasi (penafsiran data), historiografi (rekonstruksi sejarah dalam bentuk tulisan).¹³

1. Heuristik

Pengumpulan sumber atau dalam kajian sejarah akan lebih dikenal dengan heuristik. Heuristik merupakan proses pencarian atau pengumpulan sumber-sumber yang akan digunakan untuk merekonstruksi sejarah. Sebelum menentukan teknik

¹³ Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, (Makassar: Rayhan Intermedia, 2013), hlm.10.

pengumpulan sumber sejarah, pertama-tama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat (dimana) atau siapa (sumber informasi lisan) dan cara memperolehnya. Sumber sejarah dibedakan atas sumber tulisan, lisan, dan benda. Sumber sejarah primer yang tertulis dalam sejarah umumnya berupa dokumen (arsip).¹⁴

Data-data yang dikumpulkan yaitu buku-buku dari Desa Lentu yang diperoleh dari kantor desa, disamping data tertulis, penulis juga akan mengumpulkan data lisan. Data yang diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan kepala desa dan masyarakat Desa Lentu. Penulis mencari dan mengupayakan penemuan atas sumber sejarah yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Peneliti ini mengumpulkan berbagai informasi mengenai Desa Lentu.

Dalam melakukan pengumpulan sumber, penulis menempuh dua cara yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka.

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, pada penelitian ini maka data awal yang penulis gunakan diperoleh dari wawancara dan observasi lingkungan atau daerah penelitian serta melakukan studi wawancara dilakukan di Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan mewawancarai kepala desa dan masyarakat Desa

¹⁴ Abdul Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), Hlm, 43.

Lentu, dengan alasan warga Desa Lentu merupakan penduduk asli atau yang sudah lama berdomisili di Desa Lentu.

b. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka merupakan langkah pengumpulan sumber dengan jalan mencari buku-buku yang memiliki kaitan dengan judul yang akan dikaji dimana kajian ini mengenai Desa Lentu. Penelusuran bahan pustaka dilakukan dipergustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar, Perpustakaan Umum UNM dan Kantor Desa Lentu.

2. Kritik Sumber

Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan melalui beberapa metode yang penulis sebelumnya akan dilakukan kritik sumber untuk menentukan keaslian data dan kebenaran sumber sejarah. Sumber yang telah didapatkan dari pengumpulan data kemudian akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu karena tidak semua data yang diperoleh dapat digunakan pada karya tulis ini.

Penentuan keaslian suatu sumber berkaitan dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut, atau biasa disebut dengan kritik eksternal. Sedangkan, penyeleksian informasi yang terkandung dalam sumber dapat dipercaya atau tidak, dikenal dengan kritik internal. Setiap sumber sejarah diperlakukan sama, yakni diseleksi baik secara eksternal maupun internalnya. Tahap penyeleksian harus sistematis yakni diawali dengan kritik eksternal dan kemudian kritik internal. Jika tahap pertama suatu sumber

sejarah tidak memenuhi syarat sebuah sumber sejarah (dari segi otentitasnya) tidak perlu dilakukan verifikasi tahap berikutnya.¹⁵

Jadi pada tahapan ini diperlukan kejelian dan konsentrasi tinggi untuk menyeleksi sumber yang layak menjadi bahan dari penelitian ini agar tercapai penelitian yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Kritik yang digunakan, kemudian pada tahapan kritik terbagi atas dua yaitu: kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan mengkritik bentuk fisik sumber sedangkan kritik internal dilakukan dengan cara mengkritik apa yang terkandung pada sumber sejarah seperti tulisan, gaya bahasa, dan lain-lain, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang asli.

3. Intrepertasi

Sebelum sampai pada tahap historiografi, terlebih dahulu fakta sejarah tersebut digabung-gabungkan (disintasekan) berdasarkan pada subjek kajian, dalam kaitan itu tema pokok kajian merupakan kaidah yang dijadikan sebagai kriteria dalam menggabungkan data sejarah. Data yang tidak berkaitan dengan tema studi dipisahkan agar tidak mengganggu peneliti merekonstruksi peristiwa sejarah.

Tahap ketiga dalam metode sejarah ialah interpretasi. Interpretasi adalah proses pemaknaan fakta sejarah . Dalam interpretasi, terdapat dua poin penting, yaitu sintesis (menyatukan) dan analisis (menguraikan). Fakta-fakta sejarah dapat diuraikan dan disatukan sehingga mempunyai makna yang berkaitan satu dengan lainnya. Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar sesuatu

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 43.

peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yakni dengan jalan menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta dalam urutan kausal. Dengan demikian, tidak hanya pertanyaan dimana, siapa, bilamana, dan apa yang perlu dijawab, tetapi juga yang berkenaan dengan kata mengapa dan apa jadinya.¹⁶

4. Historiografi

Tahap keempat ini adalah tahap terakhir metode sejarah setelah sumber dikumpulkan kemudian dikritik (seleksi) menjadi data dan kemudian dimaknai menjadi fakta, langkah terakhir adalah menyusun semuanya menjadi satu tulisan utuh berbentuk narasi kronologis. Imajinasi sejarawan bermain disini, tetapi tetap terbatas pada fakta-fakta sejarah yang ada. Semuanya ditulis berdasarkan urutan-urutan waktu. Dalam historiografi modern (sejarah kritis), seorang sejarawan yang piawai tidak lagi terpaku kepada bentuk penulisan yang naratif atau deskriptif, tetapi dengan multi dimensionalnya lebih mengarah kepada bentuk yang analitis dan mempunyai kemampuan memberi keterangan yang lebih unggul dibandingkan dengan apa yang ditampilkan oleh sejarawan konvensional dengan sejarah naratifnya.¹⁷

¹⁶ Muhammad Saleh Madjid, Dkk. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Makassar: Tim Pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah, 2012), hlm. 41.

¹⁷ *Ibid.* Hlm . 42.

BAB II

GAMBAR UMUM DESA LENTU KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO

A. Keadaan Geografis

Aspek geografis dalam ilmu sejarah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada suatu tempat tertentu, bahkan menjadi salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pola hidup suatu masyarakat seperti mata pencaharian, keadaan penduduk, dan watak kepribadian masyarakat. Oleh karena itu perlu dibahas secara umum mengenai kondisi Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Letak

Kecamatan Bontoramba merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa¹. Desa Lentu berada di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yang mempunyai luas wilayah 610 Ha dan terletak dibagian Selatan Kecamatan Bontoramba. Adapun batas-batas wilayah Desa Lentu yaitu :

- Sebelah Selatan : Kecamatan Tamalatea
- Sebelah Utara : Kelurahan Bontoramba
- Sebelah Barat : Kelurahan Tonrokassi Timur
- Sebelah Timur : Desa Karelayu²

¹ *Kecamatan Bontoramba Dalam Angka 2014*, BPS Kabupaten Jeneponto, Hlm xiv.

² *Ibid* 1

Desa Lentu memiliki jarak ± 2 Km dari Ibu Kota Kecamatan Bontoramba yang dapat ditempuh dalam waktu 10 menit, sedangkan dari ibu kota Kabupaten Jeneponto berjarak ± 15 Km dan dapat ditempuh dengan waktu 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Secara umum alat transportasi yang digunakan masyarakat Desa Lentu menuju kedesa tetangga serta dari Ibu Kota Kecamatan atau Kabupaten adalah kendaraan roda dua dan roda empat, jalanan yang menghubungkan antara Desa Lentu dengan desa-desa lainnya pada umumnya jalannya sudah beraspal.

B. Keadaan Demografi

Demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk atau dengan istilah lain berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan seperti kelahiran, kematian, migrasi, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.

Penduduk merupakan salah satu faktor pendukung yang mempunyai peran besar dalam proses pelaksanaan pembangunan disuatu wilayah atau daerah, termasuk di Desa Lentu. Bahkan dalam pembangunan nasional manusia atau masyarakat merupakan obyek pembangunan yang berarti, karena manusialah yang melakukan pembangunan dan ditujukan untuk kepentingan manusia itu sendiri yang selanjutnya akan menikmati hasil-hasil dari pembangunan tersebut.

Masalah kependudukan sangatlah penting dalam pengembangan suatu daerah yang diwarnai dengan beberapa ciri seperti jumlah penduduk, jenis kelamin, jenis pekerjaan, agama dan lain-lain. Semakin padatnya suatu wilayah karena disebabkan oleh angka kelahiran yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Penduduk merupakan salah satu faktor pendukung yang mempunyai peran besar dalam proses pelaksanaan pembangunan disuatu wilayah atau daerah, termasuk di Desa Lentu. Bahkan dalam pembangunan nasional manusia atau masyarakat merupakan obyek pembangunan yang berarti, karena manusialah yang melakukan pembangunan dan ditujukan untuk kepentingan manusia itu sendiri yang selanjutnya akan menikmati hasil-hasil dari pembangunan tersebut.

Desa Lentu merupakan desa yang berpenduduk kurang padat dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Bontoramba. Hasil sensus penduduk tahun 2007 tercatat 2.540 jiwa, laki-laki sebanyak 1.205 jiwa dan perempuan sebanyak 1.335 jiwa. Jumlah penduduk yang sebesar itu merupakan asset desa yang perlu dikembangkan agar menjadi angkatan kerja yang berkualitas dan membawa perubahan positif yang signifikan untuk kedepannya. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa Lentu.³

³ *RPJMD*. Tahun 2011-2015. Hal 7.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Lentu 2007

No	Nama Dusun	Jumlah KK	L	P	Jumlah
1.	Alluka	61	122	177	299
2.	Campagaya	156	276	321	597
3.	Parangga	106	205	195	400
4.	Sapaya	125	220	240	460
5.	Ta'binjai	198	382	402	784
	Total	646	1205	1335	2540

Sumber : Hasil Sensus Penduduk Desa Lentu⁴

Tingkat pertumbuhan penduduk tidak terlalu menungkat hanya saja tingkat pekawinan usia dini yang masih tinggi dimana rata-rata usia perempuan menikah diusia 15-18 tahun yang semestinya harus mengenyam pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Meskipun demikian angka kepadatan penduduk Desa Lentu masih dapat ditekan, dan hal ini sudah terbukti dengan kurangnya jumlah anak dalam setiap rumah tangga dari setiap pasangan usia subur, dimana setiap rumah tangga rata-rata punya anak 1-3 saja, hal ini sangat terbukti dengan adanya alat Kontrosepsi yaitu KB yang tersedia dipuskades secara gratis sehingga dapat ditekan pertumbuhan anak serta meningkatnya kesadaran warga tentang keluarga berencana yang telah dirancang pemerintah.

1. Pemukiman Penduduk

Dalam pengertian dasar pemukiman dalam UU No. 1 Tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan tempat tinggal yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, fasilitas umum. Dimana pemukiman

⁴ RPJMDES. Tahun 2011-2015. Hlm. 11

merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari deretan lima kebutuhan hidup manusia pangan, sandang pemukiman, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa pemukiman menempati posisi yang sentral, dengan demikian peningkatan pemukiman akan meningkat pula kualitas hidup.

Saat ini manusia bermukim bukan sekedar sebagai tempat berteduh, namun lebih dari mencakup rumah dan segala fasilitasnya. Seperti yang dikemukakan oleh Sumaatmadja (1988) sebagai berikut:

Pemukiman adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan.

Awalnya pemukiman yang dibangun sebagai tempat tinggal semata-mata untuk memenuhi kebutuhan fisik, selanjutnya berkembang menjadi kebutuhan estetika dan menjadi kebutuhan ekonomi. Pola pemukiman mempunyai hubungan yang erat dengan persebaran pemukiman. Pembagian pola pemukiman menurut Rambali Sigh, dibedakan menjadi tiga tipe yakni pemukiman kolompok, pemukiman semi kelompok dan pemukiman menyebar⁵. Berdasarkan pembagian tipe pemukiman tersebut Desa Lentu termasuk tipe pemukiman yang menyebar. Menurut Baktiar Patau selaku kepala Desa Lentu yang sekarang mengatakan bahwa:

Desa Lentu pada awalnya hanyalah merupakan perkampungan kecil, dimana masyarakatnya terdiri dari peladang yang berpindah-pindah dari satu tempat yang lain (nomaden). Kemudian pada perkembangan selanjutnya terbentuklah kampung-kampung kecil.

⁵ Baktiar Patau (Kepala Desa Lentu Sekarang), Wawancara, Tanggal 05 September 2016.

Rumah tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling dasar bagi manusia disamping kebutuhan pangan dan sandang. Rumah tempat tinggal pada umumnya dibedakan menjadi tiga yakni rumah permanen, rumah semi permanen dan rumah panggung. Perbedaan pokok antara ketiga jenis rumah ini dalam hal dinding dan lantai.⁶

Berdasarkan kriteria tersebut rumah di Desa Lentu termasuk jenis rumah panggung. Hal ini disebabkan karena penduduk Desa Lentu masih berada dibawah garis kemiskinan. Sehingga penduduk hanya mampu membangun rumah panggung yang sederhana. Kondisi rumah di Desa Lentu awalnya sangat sederhana yang terdiri dari rumah darurat, bertiang kayu, berdinding bambu dan atap dari ijuk. Pintu rumah terbuat dari kayu.

Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pada tahun 1990 an sebagian kecil masyarakat Desa Lentu sudah mampu membangun rumah semi permanen. Hal ini disebabkan karena, tingkat perekonomian masyarakat yang sudah meningkat. Setelah proses yang panjang sedikit demi sedikit perekonomian masyarakat mengalami peningkatan. Sehingga pembangunan terus dilakukan oleh masyarakat. Untuk mengetahui jumlah rumah

⁶ Baktiar Patau (Kepala Desa Lentu sekarang), Wawancara, Tanggal 05 September 2016.

panggung, semi permanen dan permanen dari tahun 1991-2015 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah Rumah Panggung, Semi Permanen dan Permanen Desa Lentu Perbandingan Antara Tahun 1998-2015

No	Tahun	Panggung	Semi Permanen	Permanen	Jumlah
1	1998	444	388	15	847
2	1999	487	388	15	890
3	2002	577	561	2	1.140
4	2003	585	572	10	1.167
5	2004	585	572	12	1.169
6	2005	583	572	12	1.167
7	2006	485	396	54	935
8	2007	486	398	54	938
9	2008	486	398	54	938
10	2009	486	398	54	938
11	2010	486	398	54	938
12	2011	488	398	57	943
13	2012	511	354	60	925
14	2013	515	367	62	944
15	2014	576	413	68	1.057
16	2015	621	433	72	1.126

Sumber: BPS Kabupaten Jenepoto tahun 1998-2015⁷

Berdasarkan Tabel 2.2 bahwa pemukiman atau tempat tinggal penduduk Desa Lentu pada tahun 1998-2015 masih didominasi semi permanen. Kemudian pada tahun 2002-2005 jumlah rumah panggung, semi permanen dan permanen mengalami peningkatan yang tinggi. Kemudian pada tahun 2006-2013 mengalami pengurangan jumlah rumah panggung, semi permanen dan permanen akibat kebakaran. Pada tahun

⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Tahun 1998-2015.

2014-2015 mengalami peningkatan lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah tempat tinggal sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk apabila penduduk suatu daerah atau desa meningkat maka meningkat pula jumlah tempat tinggal.

2. Perkembangan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk sangat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam dan sekitarnya.

Berdasarkan kriteria tersebut perkembangan peradaban untuk daerah ini termasuk pada tahap yang kedua yakni mengembangkan pertanian secara menetap. Dalam tahun 1999 jumlah penduduk Desa Lentu sebesar 2.045 jiwa sampai pada tahun 2015 jumlah penduduk Desa Lentu mengalami peningkatan sebesar 2.223 jiwa⁸.

Berdasarkan data yang diperoleh pada kantor BPS Kecamatan Bontoramba jumlah penduduk Desa Lentu berdasarkan dari tahun ke tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

⁸*RPJMDes Desa Lentu Kecamatan Bontoramba, Tahun 2011-2015*

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Laki-Laki & Perempuan
Dari Tahun 1999-2015**

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	1999	1022	1023	2045
2	2000	1010	1046	2056
3	2001	1032	1030	2062
4	2002	1002	1087	2089
5	2003	960	1023	1983
6	2004	961	1019	1980
7	2005	1048	1104	2152
8	2006	1032	1100	2132
9	2007	1031	1113	2144
10	2008	1035	1117	2152
11	2009	1042	1122	2164
12	2010	1041	1123	2164
13	2011	1045	1133	2178
14	2012	1049	1141	2190
15	2013	1054	1148	2202
16	2014	1057	1155	2212
17	2015	1061	1162	2223

Sumber : Kaubang Kecamatan Bontoramba.⁹

Pada Tabel 2.3 di atas menggambarkan bahwa jumlah penduduk dari tahun ketahun mengalami naik turun 1999-2002 mengalami peningkatan jumlah penduduk dan pada tahun 2003-2004 mengalami penurunan setelah itu pada tahun 2005 mengalami peningkatan kemudian tahun 2006 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan, kondisi seperti ini terjadi tingkat kematian, kelahiran , pernikahan, perpindahan.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Tahun 1999-2015.

C. Latar Belakang Terbentuknya Desa Lentu

Desa Lentu berasal dari nama Toddo Appaka Lentu yang artinya karaeng/raja yang melantik para karaeng/raja yang ada di Jeneponto. Toddo Appaka Lentu memberikan nama Desa Lentu, karena beliau ingin dikenang masa hidupnya yang begitu bersejarah di Desa Lentu.¹⁰

Pembentukan Desa didasarkan pada Sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut UUD 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dimana posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Sehingga proses pembentukan Desa Lentu juga didasarkan pada beberapa pertimbangan yuridis. Adapun pertimbangan tersebut sebagai berikut:

1. Pancasila

Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia, memiliki lima dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan bernegara. Dalam proses pembentukan Desa Lentu, lima dasar dari Pancasila menjadi inspirasi bagi para tokoh penggagas pembentuk Desa Lentu untuk melakukan langkah politik. Setiap langkah yang dilakukan selalu didasarkan pada nilai ketuhanan, demokrasi, musyawarah, persatuan dan keadilan.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dalam Negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam

¹⁰Baktiar Patau, Wawancara, Tanggal 05 September 2016.

Undang-Undang Dasar 1945 termuat Asas Desentralisasi pada Pasal 18 tentang pemerintah daerah yang berbunyi :

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak, asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional dalam Pembentukan Desa Lentu. Aksi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk Desa Lentu merupakan aksi yang sejalan dengan asas desentralisasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

3. Undang-Undang Dasar Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan

Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto yang kita kenal pada saat itu termasuk salah satu diantara beberapa daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Berdasarkan undang-undang tersebut daerah Jeneponto telah berdiri sebagai suatu daerah otonomi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hubungannya dengan Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan pemerintah di Kabupaten Jeneponto adalah kekuasaan pada Pemerintah Daerah, yang mana Pemerintah Daerah Jeneponto

mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah setiap Kecamatan ataupun setiap desa berdasarkan hak otonomi (Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi).

Terbentuknya daerah otonomi Daerah Tingkat II Jeneponto sebagai mana telah dikemukakan di atas yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, maka daerah telah memperoleh hak dan kewajiban untuk mengurus dan menyelenggarakan kepentingan rumah tangga sendirinya, pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah untuk mengurus dirinya dan memberi kesempatan yang besar untuk mengelola potensi yang ada. Dari sini daerah diharapkan dapat menggali potensi yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan menerima bagian lebih besar dari dana pembangunan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1957 dan penetapan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1959.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan daerah tingkat II Jeneponto menyusul pula pembentukan kecamatan-kecamatan, yang mana sebelumnya kecamatan disebut sebagai Distrik. Kemudian setelah pembentukan kecamatan menyusul pula dilakukan pembentukan Desa dan Kelurahan pada setiap kecamatan.¹¹

4. Pembentukan Desa

Pembentukan desa dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Undang-

¹¹RPJMDES Desa Lentu Kecamatan Bontoramba, Tahun 2011-2015. Hlm 23

Undang ini menjelaskan tentang Pembentukan Desa, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa. Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Luas wilayah 610 Ha
- b. Jumlah penduduk 1.000 Keatas
- c. Batas dan kewenangan

Pembentukan Desa Lentu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto karena telah memenuhi syarat menjadi sebuah desa. Desa Lentu dibentuk karena adanya usulan dari masyarakat yang kemudian disetujui oleh pemerintah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena mengingat wilayah Desa Lentu jauh dari pusat pemerintahan, sehingga masyarakat terkadang mengalami kesulitan dalam hal pelayanan.

Desa Lentu dibentuk pada tahun 1991, pemekaran di Kelurahan Bontoramba. Pemekaran Kelurahan Bontoramba ini bertujuan untuk mengembangkan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik serta percepatan pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Desa Lentu merupakan pecahan dari kelurahan Bontoramba. Dimekarkan pada tahun 1991 sebagai desa persiapan. Berikut periode kepemimpinan Desa Lentu berdasarkan sejarah.

Tabel 2.4 Daftar Nama Kepala Desa Lentu

No.	Nama	Tahun Kejadian
1.	H. Mustari Lallo	1991-1992
2.	Hj. St. Sarbiah	1993-2001
3.	Baktiar Patau	2002-2007
4.	H. Baso Sulaeman	2007-2013
5.	Baktiar Patau	2013-2018

Sumber data : Profil Desa Lentu Tahun 2013¹²

Desa Lentu pada awalnya hanyalah merupakan perkampungan kecil, dimana masyarakatnya terdiri dari para petani. Kemudian pada perkembangan selanjutnya terbentuklah kampung-kampung kecil. Dengan terbentuknya kampung-kampung kecil maka dengan sendirinya terbentuk pula susunan kemasyarakatan dengan berbagai ciri khas didalamnya. Kata Lentu diambil dari nama Toddo Appaka Lentu yang merupakan nama kerajaan atau karaeng yang ada di Jenepono, dan disingkat dengan nama Lentu.

¹²Arsip Desa Lentu.

Sebagai masyarakat tradisional dikonseptualisasikan sebagai suatu masyarakat yang mempunyai kesatuan kelompok yang kuat, serta cara hidup yang tersusun menjadi suatu sistem yang teratur yang dinamakan “kebudayaan” dan pola tingkah laku tradisional, rasa persaudaraan serta hubungan dengan institusi yang merupakan corak pengalaman yang biasa dan kelompok keluarga merupakan unit untuk bertindak. Demikian juga tidak terdapat Undang-Undang, tetapi mereka hanya diikat oleh adat, norma dan etika.

BAB III

PERKEMBANGAN DESA LENTU KECAMATAN BONTORAMBA

KABUPATEN JENEPONTO (1991-2015)

A. Pemerintahan

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹

Ditinjau dari sudut pemerintahan desa sebelum tahun 1979, pemerintahan desa merupakan pemimpin rakyatnya karena meraka dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian berubah menjadi alat pemerintah atasan. Berubahnya pemerintahan desa disebabkan karena lahirnya sebuah Undang-undang Nasional tentang Pemerintahan Desa yang efektif yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1979.

Pengaturan pemerintahan desa seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1979 dan semua peraturan pelaksanaannya, yang banyak berbeda dengan peraturan sebelumnya. Dengan demikian salah satu unsur yang sangat penting dalam pemerintahan adalah adanya pemimpin. Pemimpin merupakan orang atau pejabat yang diberikan tanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas agar tujuan dari unit yang dipimpinnya tercapai dengan adanya bantuan dan kerja sama.²

Proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, telah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999

¹Prof. Drs. Haw. Widjaja. *Otonomi Desa*. (Jakarta:Rajawali Pers. 2014) hlm. 3

² Zaidan Navian. *Manajemen Pemerintahan*. (Depok: PT Rajagrafinda Persada), hlm 32

tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan . Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Bab XIV Pasal 93-111 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensin dan keanekaragaman daerah.

Dalam pemerintahan apa pun, termasuk dalam pemerintahan desa, selalu terdapat sekelompok orang yang memiliki kekuasaan tertentu. Sumber kekuasaan itu pun dapat beranekaragam biasanya merupakan anggota dinasti yang memerintah pada suatu kerajaan atau memiliki peranan penting dalam masyarakat. Terpilihnya sebagai pemimpi karena memiliki wibawa pribadi yang baik, atau karena memiliki pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Namun dikalangan masyarakat mempunyai presepsi yang berbeda-beda tentang kekuasaan yang dalam bentuk kepemimpinan yang tercermin pada pemimpin yaitu:

1. Masyarakat memandang jarak kekuasaan antara penguasa dan yang dikuasai sebagai hal yang wajar dan normal. Dalam peraktek itu berarti bahwa semakin tinggi kedudukan dan jabatan seseorang semakin jauh pula jaraknya dari orang-orang yang dikuasainya. Dengan demikian masyarakat beranggapan bahwa terjadi stratifikasi sosial.

2. Jarak kekuasaan antara penguasa dengan yang dikuasai itu pendek. Dengan situasi ini tercermin dalam kehidupan yang demokratis, baik dibidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas Desa Lentu terbentuk pada tahun 1991 berasal dari pemekaran Kelurahan Bontoramba. Pemekaran Kelurahan Bontoramba ini bertujuan untuk mengembangkan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik serta percepatan pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Desa Lentu telah mencapai 2.425 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 669 KK dan luas wilayahnya 610 Ha.³

Kepemimpinan dimasyarakat Desa Lentu tercermin kepemimpinan yang berdemokratis. Hal ini terbukti dengan pemilihan pemimpin atau kepala desa di Lentu, dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Desa Lentu telah lima kali melakukan pergantian kepala desa.

1. H. Mustari kr. Lallo (1991-1992)

Desa Lentu dimekarkan pada tahun 1991 dari pecahan kecamatan Bontoramba. Desa ini telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebuah desa karena penduduknya sudah memenuhi dan jarak dari kecamatan pun lumayan jauh untuk ditempuh. Pada saat terbentuknya Desa Lentu masyarakat pada waktu itu menyetujui atas dasar musyawarah tokoh masyarakat dan masyarakat setempat bahwa yang memerintah kepala desa yaitu bapak H. Mustari Kr. Lallo sebagai kepala desa persiapan.

³ Baktiar Patau (Kepala Desa Lentu Periode 2013-2019), Wawancara, Tanggal 03 September 2016

Masa pemerintahan H. Mustari Kr. Lallo di Desa Lentu belaku selama dua tahun yaitu pada tahun 1991-1992 sebagai desa persiapan. H. Mustari Kr. Lallo sebagai kepala desa dilakukan pelantikan oleh bupati Jeneponto yaitu Bapak Abbas Sabbi dikantor Bupati. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Lentu dalam pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan pola dasar pembangunan yang akan direncanakan. Setelah menjabat sebagai kepala desa periode pertama perubahan yang pertama dilakukan adalah pembenahan struktur pemerintahan yakni Desa Lentu atas empat dusun (Campagaya, Tabinjai, Sapayya, & Paranga).⁴

2. Hj. St. Sarbiah

Dalam periode 1993-2001 dilakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam tatanan pemerintahan. Perubahan tersebut disebabkan adanya peralihan dari Orde Baru ke Reformasi. Dengan adanya perubahan, maka system penyelenggaraan pemerintah daerah mulai adanya perubahan-perubahan seperti perubahan manajemen dan administrasi pemerintahan desa diantaranya yaitu pembangunan kantor desa, pengadaan pompa air 12 unit, rehab irigasi la'ba cere, pembagian subsidi BBM & raskin, pembinaan dan pengaktifan karang taruna, kelembagaan, kepegawaian, yang ada di Desa Lentu. Sebagai kepala desa Hj. St. Sarbiah tentu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Lentu. Dalam perkembangannya terjadi perubahan besar dengan menjabatnya Hj. St. Surbiah.

⁴ H. Mustari (Kepala Desa Lentu Periode 1991-1992), Wawancara, Tanggal 05 September 2016

Pada pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 1993 yang terpilih sebagai kepala Desa Lentu yaitu Hj. St. Sarbiah. Sistem pemilihan sudah melakukan pemilihan umum sesuai dengan surat keputusan pemerintah daerah Jeneponto. Tentang peraturan tata tertib pemilihan kepala desa, yang berhak memilih kepala desa adalah masyarakat yang berusia 18 tahun keatas dan telah terdaftar sebagai penduduk Desa Lentu. Pengambilan suara dilakukan dengan memilih salah satu dari calon kepala desa. Setelah terpilih menjadi kepala Desa Lentu, Hj. St. Sarbiah dilantik oleh Bupati kepala daerah Kabupaten Jeneponto.⁵

3. Baktiar Patau

Pada pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 2002-2007 yang terpilih sebagai kepala Desa Lentu yaitu Baktiar Patau. Pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa yaitu memaksimalkan usaha kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk membangun pemerintahan di Desa Lentu seperti, pembangunan jalan desa Campagaya-Paranga, lanjutan program subsidi BBM & raskin, rehab jembatan Ta'binjai, pengadaan lomba tujuh belas agustusan. Adapun pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah yang mana pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh kepala desa dan masyarakat. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu cangkul, linggis, pancul, skopang, parang ember serta bahan yang digunakan adalah pasir batu-batu kerikil dan

⁵Hj. St. Sarbiah (Kepala Desa Lentu Periode 1993-2001), Wawancara, Tanggal 05 September 2016.

semen. Pekerjaannya dilakukan oleh kepala desa dan masyarakat dengan cara gotong royong.⁶

4. H. Baso Sulaiman

Pada masa pemerintahan H. Baso Sulaiman pada tahun 2007-2013 telah mengalami perubahan peningkatan prasarana & perekonomian untuk masyarakat Desa Lentu. Bentuk prasarana seperti perbaikan jalanan, pembangunan poskeskes, pembangunan kantor desa baru, pembangunan jembatan Alluka, pembangunan gedung SMA 1 Bontoramba yang ada di dusun Campagaya, pemekaran dusun dari empat menjadi enam, pembangunan gedung sekolah MIS (Madrasah Ibtidaiyah), rehab mesjid dusun Sapayya, pembagian tabung gas, dan penataan pemukiman. Adapun perbaikan jalan ini dilakukan karena kondisi jalan yang ada di Desa Lentu kurang memperhatikan, karena jalan menuju Desa Lentu masih banyak yang berlubang sehingga pada musim hujan kendaraan bermotor terjadi kecelakaan karena jalanan lubang tersebut tertutupi dengan genangan hujan. Namun setelah adanya perbaikan jalan dilakukan oleh pemerintah daerah, maka kendaraan sudah dapat melewati jalan tersebut sehingga memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah tidak mencakup secara keseluruhan untuk Desa Lentu hanya jalanan poros dari Kecamatan Tamalatea hingga Kecamatan

⁶Baktiar Patau (Kepala Desa Lentu Periode 2002-2007), Wawancara, Tanggal 05 September 2016

Bontoramba. Perbaikan jalan ini terkendala dalam hal dana untuk pembangunan desa.⁷

5. Baktiar Patau

Pemerintahan Baktiar Patau di Desa Lentu dari tahun 2013-sekarang. Adapun program kerja yang dilakukan oleh Bapak Baktiar Patau yaitu meningkatkan rasa gotong royong antar masyarakat, melaksanakan perayaan hari kemerdekaan pada tanggal 17 agustus, dan meningkatkan pemebinaan kesejahteraan yang bernilai agama seperti melakukan MTQ (Membaca Tulis Alqura'an) yang dilakukan oleh remaja mesjid pada bulan suci ramadhan dan Majelis Ta'lim setiap hari kamis yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga di Desa Lentu. Serta adanya penambahan perintisan jalan disetiap dusun yang ada di Desa Lentu pada tahun 2007-2013 program PNPM, pembangunan jalan tani, drainase, pembangunan jalan setapak, pengaktifan TK/TPA disemua mesjid dan melakukan penimbangan aktif dimasing-masing posyandu, mengadakan bak air, saluran air, dan adanya perbaikan jalan ke kuburan,⁸

B. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial masyarakat di Desa Lentu bisa dikatakan stabil/baik (rukun). Hal demikian dikarenakan hampir semua masyarakat yang ada memiliki hubungan kekerabatan dalam lingkungan tersebut, selain itu budaya dan bahasa yang sama dalam lingkungan masyarakat.

Nilai dan sistem nilai didesa berbeda dengan di kota. Hal ini dapat diamati dari kebiasaan, cara, dan norma yang berlaku. Nilai agama, nilai ekonomi,

⁷ Muh. Abbas Mile (Sektretaris Desa Lentu), Wawancara, Tanggal 06 September 2016.

pendidikan, sangat kontras perbedaannya. Nilai-nilai agama didesa banyak dimanifestasikan dalam berbagai kegiatan ritual sementara dikota lebih pada alat motivasi hidup. Nilai pendidikan didesa, hanya sekedar bisa baca tulis, sementara dikota sebagai dasar pencapaian hidup yang mapan.⁹

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat sangat luas, beragam, dan tak terbatas menyangkut perubahan-perubahan nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan sosial, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Ciri masyarakat dinamis adalah masyarakat yang mengalami banyak perubahan dengan cepat.

Budaya gotong royong juga masih kental didesa ini, gotong royong biasanya dilakukan untuk saling membantu dalam segala hal untuk memudahkan penyelesaiannya. Misalkan, memidahkan/membangun rumah, terjadinya bencana, dan lain-lain yang dianggap perlu dibantu dalam penyelesaiannya.

Dalam segi pelapisan sosial, orang yang memiliki gelar *karaeng* dalam lingkungan masyarakat akan dipanggil *karaeng* dan agak dipandang selain keturunan bangsawan perekonomiannya juga diatas rata-rata. Selain yang bergelar *karaeng*, orang yang berpengaruh atau memiliki kedudukan dalam lingkup masyarakat seperti kepala Desa, Guru, dan orang-orang yang kondisi ekonominya diatas rata-rata (kaya) juga akan terpandang dan dihormati dalam lingkup masyarakat.

⁹Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Makassar: Ombak, 2012), Hlm 57

Dalam segi kepercayaan, masyarakat Desa Lentu 100% memeluk Agama Islam dan didesa ini difasilitasi empat tempat beribadah, yaitu enam mesjid dan satu mushallah. Enam mesjid yang ada dipungsikan seperti mesjid pada umumnya kecuali mushallah, mushallah yang ada tidak digunakan untuk shalat jum'at tetapi aktivitas ibadah lainnya tetap dijalankan dalam mushallah ini.

Sementara dilihat dari sisi ekonomi, masyarakat bekerja sebagai petani, peternak, PNS¹⁰. Dari pekerjaan inilah masyarakat memenuhi kebutuhan kesehariannya, tetapi mayoritas pekerjaan masyarakat banyak bergelut disekto pertanian karena didukung dari segi letak geografisnya, sedangkan yang berpropesi sebagai PNS hanya sebagian kecil saja, dan potensi peternakan dan pertanian di Desa Lentu merupakan pekerjaan yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat.

C. Keadaan Ekonomi

Ekonomi adalah salah satu segi kehidupan yang erat hubungannya dengan sendi kehidupan lainnya. Proses pembangunan selama ini telah berhasil menciptakan kemajuan diukur dari pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, namun demikian pengembangan agribisnis yang handal perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sehingga dapat mengakselerasi pembangunan khususnya agribisnis. Adapun kondisi infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan agribisnis terdiri dari prasarana dan sarana ekonomi, prasarana dan sarana perhubungan, prasarana dan sarana telekomunikasi dan

¹⁰H. Mustari (Kepala Desa Lentu Periode 1991-1992), Wawancara, Tanggal 05 September 2016

informasi, prasarana dan sarana pengairan, prasarana dan sarana air bersih dan air limbah.

Ditinjau dari letak geografis, Desa Lentu sangat strategis untuk pengembangan daerah pertanian, peternakan, pengembangan usaha kecil menengah. Peternakan dan pertanian merupakan potensi terbesar di Desa Lentu karena sebagian besar sumber penghasilan masyarakat adalah berternak dan bertani. Masyarakat Desa Lentu yang mayoritas bertani selain menanam tanaman pangan juga menanam tanaman hortikultura seperti sayuran dan cabe. Tanaman hortikultura biasa ditanam pada hujan dan kemarau tapi tidak semua masyarakat melakukan penanaman ini dikarenakan faktor kurangnya sumber air. Potensi diharapkan dapat menjadi tenaga pendorong kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lentu dimasa akan datang.¹¹

Pada tahun 2015 desa ini merupakan desa yang masuk dalam kategori desa yang tingkat kesejahteraannya masih rendah, karena angka kemiskinan masyarakat yang masih cukup tinggi, kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasarnya masih kurang disebabkan karena tingkat pendidikan masih relatif rendah. Dalam penentuan tingkat kesejahteraan terhadap setiap kepala keluarga, kader pemberdayaan masyarakat menggunakan metode partisipatif dengan 13 indikator yang disertai ciri-ciri pembeda dari masing-masing indikator. Kepemilikan rumah, kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, kemampuan memperoleh layanan kesehatan dan lain-lain. Kehidupan masyarakat Desa Lentu bergantung pada sektor pertanian dan peternakan.

¹¹ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Bontoramba Desa Lentu*. Tahun 2011-2015.

1. Sektor pertanian

Jenis tanaman pertanian yang dibudidayakan di Desa Lentu terdiri dari jenis tanaman jangka pendek seperti padi, jagung putih/kuning, serta tanaman hortikultura lainnya seperti kacang hijau, singkong, dan untuk tanaman jangka panjang seperti kelapa. Dari hasil pertanian warga yang pekerjaan pokoknya adalah petani itulah dijadikan sumber bahan makanan dan sebagian dijual untuk kebutuhan sehari-hari lainnya.

Melihat pembangunan pertanian sebagai program yang mempunyai dua aspek. Pertama; pembangunan pertanian bertujuan membentuk manusia petani sejahtera. Kedua; pembangunan pertanian dilandaskan pada kenyataan, bahwa baik manusia petani maupun sektor pertanian harus berpijak dan diletakkan dalam suatu kehidupan pedesaan. Disinilah letak kaitan antara pembangunan pertanian dan pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan bertujuan menciptakan lingkungan hidup yang memberi tempat pemukiman yang sehat serta wilayah pembangunan yang berkembang, mengingat bahwa pertanian hampir seluruhnya terletak di kawasan pedesaan. Maka pembangunan kawasan pedesaan hanya mungkin terjadi kalau ada pembangunan pertanian dan sebaliknya, pembangunan pertanian hanya mungkin terjadi dalam kawasan pedesaan yang berkembang. Kedua hal itu, pembangunan pertanian dan pembangunan kawasan pedesaan, memerlukan sarana yang datang dari dalam desa itu sendiri, termasuk sumber daya manusia yakni petani itu sendiri.¹²

¹²*Ibid*, Hlm. 69

Tabel 3.1 Pola Penggunaan Tanah Masyarakat Desa Lentu

NO	Penggunaan Tanah	Luas (Ha/m²)
1.	Persawahan	280
	- Sawah Irigasi Teknis	100
	- Sawah ½ Teknis	100
	- Sawah Tadah Hujan	80
2.	Perkebunan	134
	- Tegal / Ladang	60
3.	Perkuburan	1
4.	Perkarangan / Perkampungan	10
5.	Taman	7
6.	Perkantoran	1
7.	Prasarana umum lainnya	3
Total		776

Sumber Data : Profil Desa Lentu Tahun 2013

Dari hasil tabel 3.1 diatas dapat dikemukakan bahwa penggunaan tanah yang seluas 776 Ha/m² sedapat mungkin ditunjukan kepada kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data terakhir tahun 2013, menunjukan penggunaan tanah untuk sawah dan kebun merupakan pemanfaatan lahan terluas selain kawasan hutan.

Untuk lahan pertanian pada umumnya warga memiliki setepak bahkan ada yang sangat luas lahannya, sehingga masyarakat yang tidak punya lahan sama sekali, hanya menjadi buruh tani dan sudah menjadi langganan sama sang pemilik

lahan baik pada saat pengolahan tanah, penanaman, pemupukan sampai pada saat panen tetap dibutuhkan tenaganya dengan upah kerja Rp.30.000 sampai Rp.50.000 perhari dan sebagian kecil juga buruh tani yang nanti pada saat panen diberikan jagung atau uang yang lebih tinggi nilainya dibandingkan yang langsung diberikan upahnya dari hasil itulah digunakan untuk menghidupi keluarganya.

Adapun beberapa tahapan didalam sektor pertanian, diantaranya sebagai berikut :

a. Tanaman Holtikultura

Jenis tanaman pangan utama yang diutamakan petani di Desa Lentu adalah padi, jagung dan lombok. Sementara jenis tanaman holtikultura yang dibudidayakan petani adalah jenis kacang-kacang lainnya meskipun jumlah yang tidak banyak, karena air untuk menyiram tidak ada pada musim kemarau padahal ada aliran sungai yang dapat dimanfaatkan warga namun fasilitas pertanian belum memadai seperti sarana pompanisasi padahal tanaman holtikultural sangat cocok dengan tanah seperti lombok.

b. Gambaran Sistem Budidaya Tanaman Pangan Dan Holtikultural Penyiapan Lahan Untuk Tanaman Jagung.

Secara umum warga masyarakat pada saat akan memasuki musim kemarau atau pada saat musim pancaroba atau perubahan musim warga masyarakat melakukan penyiapan lahan dimulai dengan pembersihan rumput-rumput kecil tanaman-tanaman pengganggu. Untuk lahan kebun biasanya menggunakan racun seperti prima, cromoson, paracol dan racun rumput lainnya

yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan petani, semakin bagus semakin mahal harganya. Untuk lahan sawah pada musim hujan biasanya menggunakan racun DMA.

Setelah penyemprotan rumput warga membersihkan dengan cara mencabut rumput yang agak besar kemudian diangkat kepinggir-pingir kebun ada juga warga membakar rumput yang sudah disemprot. Penyiapan lahan menggunakan tenaga kuda bagi tidak punya keuangan lebih sedangkan yang memiliki kemampuan financial lebih maka mereka membajak sawah dengan menggunakan handtraktor meskipun harus menyewa.

c. Penanaman Tanaman Jagung

Setelah penyiapan lahan selesai maka selanjutnya dilakukan penanaman tanaman jagung. Penanaman dilakukan berkisar bulan November-Desember tergantung datangnya musim hujan. Penanaman dilakukan dengan cara tunggal dan ada juga yang menggunakan tenaga kuda yang mengolah kemudian langsung diikuti dengan menanam jagung dengan jarak $1 \times 1 \text{ m}^2$ bagi tanaman jagung putih, sedangkan untuk tanaman jagung kuning $25 \times 25 \text{ m}^2$ dengan satu lubang 1-2 biji.

Untuk musim kemarau jarak tanam jagung kuning sekitar $75 \times 75 \text{ m}^2$ dengan satu titik berisi 3-4 biji. Bibit tanaman jagung sudah menggunakan bibit unggul yang terkenal dengan nama Bisi-2.

d. Perawatan Tanaman

Perawatan pertama dilakukan ketika berusia 12 hari (2 minggu) dengan diberikan pupuk yaitu ZA, Urea, KCL dan SP3, dengan membandingkan 3 Urea : 1 ZA : $\frac{1}{2}$ KCL : $\frac{1}{2}$ SP3 yang dicampur jadi satu. Pemberian pupuk ini

sempurna bagi petani yang memiliki keuangan yang lebih tetapi yang tidak hanya menggunakan Urea dan ZA atau bahkan Urea atau ZA saja.

Pemupukan ini dinamakan pemupukan dasar dengan tujuan agar batang tanaman besar dan subur. Memasuki usia 1 bulan, tanaman sudah menunjukkan tanda-tanda akan berbunga dan pada saat itulah dilakukan pemupukan kedua dengan tujuan agar buah tanaman besar.

Kemudian perawatan selanjutnya ketika sudah berusia 25 hari dilakukan penyemprotan supretox yang lebih dikenal dengan nama racun pembakar rumput yang sangat ampuh karena dalam sehari rumput langsung mati tetapi harus kena sinar matahari pada saat itu juga. Meskipun cukup ampuh tidak semua petani menggunakan karena keterbatasan keuangan.

e. Pemanenan Dan Penanganan Pasca Panen

Untuk jagung kuning ketika usia 3 bulan (100 hari) dilakukan pemanenan. Biasanya hasil panen diselesaikan dikebun sehingga sampe dirumah sudah siap dijual jika musim kemarau. Tetapi jika musim hujan maka hasil tanaman jagung diangkut kerumah kemudian dijemur dan setelah kering baru didros (dipipil dengan menggunakan mesin pemipil jagung). Pengangkutan dari kebun biasanya menggunakan tenaga kuda atau mobil.

Untuk jagung putih (ketan) biasanya dijual dengan kulit jika masih muda tetapi jika sudah tua dan kering maka dijual dengan cara dikeluarkan dari batangnya. Tidak semua jagung putih dijual karena sebagian juga dimakan. Biasanya jagung putih dijual dengan kulit bagi yang masih muda, dan sebagian dimakan dan sebagian dijual.

Pemanenan jagung kuning dan jagung putih tetap dilakukan oleh kaum perempuan seperti yang dilakukan pada umumnya petani di Kabupaten Jeneponto, hanya pengangkut yang mengandalkan tenaga laki-laki.

f. Penyiapan Lahan Dan Penanaman Padi

Sama dengan penyiapan lahan pada tanaman jagung dengan melakukan penyemprotan rumput. Setelah lahan sudah bersih maka langsung dibajak dengan menggunakan handtraktor atau tenaga hewan (kuda atau kerbau). Untuk tanaman padi ada tiga jenis perlakuan tergantung kemampuan financial petani.

- 1) Yang pertama. Mula-mula bibit padi (gabah) yang akan ditanam direndam semalam, kemudian diangkat dan dimasukkan kedalam karung. Setelah didalam karung kemudian dimasukkan daun-daunan dan ditekan dengan menggunakan batu dengan tujuan agar panas dan memancing untuk tumbuh. Pembungkusan dengan menggunakan karung dilakukan selama dua hari yang setiap hari dilakukan penyiraman selama tiga kali. Setelah tumbuh tunas maka tanaman siap untuk ditanam.
- 2) Kedua. Bibit padi disemaikan pada suatu lahan sambil membajak lahan yang akan ditanami. Jika umur bibit \pm 2-4 minggu, bibit sudah dapat dipindahkan. Pemindahan dilakukan dengan cara mengupah orang yang dilakukan dengan bergotong-royong.
- 3) Ketiga. Bibit (gabah) langsung ditanam dengan cara ditabur pada lahan terutama pada lahan sawah yang bergantung pada tadah hujan atau yang

tidak di irigasi dengan alasan agar sistem pekerjaannya cepat karena hanya bergantung pada air hujan saja.

g. Perawatan, Pemanenan Dan Pengolahan Pasca Panen Padi

Untuk cara pertama pemupukan dilakukan setelah berusia 1 minggu, untuk cara yang lain bisanya diberi pupuk ketika usia 2 minggu. Pupuk yang digunakan selama ini adalah Urea, ZA, KCL dan SP3 dengan perbandingan 3 Urea : 1 ZA : $\frac{1}{2}$ KCL : $\frac{1}{2}$ SP3. Pemberian pupuk yang seimbang hanya dilakukan oleh petani yang memiliki kemampuan financial yang lebih, bagi yang kurang hanya menggunakan Urea dan ZA atau salah satu dari keduanya sehingga mempengaruhi hasil panen dan kualitas.

Perawatan dengan membersihkan lahan dilakukan dengan cara yaitu yang pertama dilakukan dengan tangan dengan cara mencabuti rumput yang kedua dengan cara kualitas.

Memasuki umur $\pm 2,5$ bulan, padi sudah mulai menguning pertanda padi siap dipanen. Pemanenan dilakukan secara gotong-royong, baik laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya petani melakukan pemanenan dengan menggunakan sabit bergerigi dan alat perontoknya menggunakan kayu/papan yang dibuat sendiri dan ada pula yang menggunakan balai-balai kecil yang dapat dipakai secara bersama-sama. Alas yang dipakai masih menggunakan tenda serta ada juga yang menggunakan mesin perontok padi yaitu menggunakan dros padi dengan cara disewa.

Perontokan padi dilakukan 3-5 kali dibolak-balik agar semua butir padi tidak ada yang tersisa. Jika perontok telah usai dilakukan, selanjutnya

dilakukan pembersihan padi pada sampahnya dan dimasukkan dikarung yang telah disiapkan. Kemudian diangkut kerumah untuk dijemur sampai kering, baru disimpan untuk dijadikan bahan makanan pokok, sebagian dijual dan dibawah kepesta.

Sebelum menanam bibit lombok terlebih dahulu dibuatkan bedengan. Tanaman ini ditanam pada musim kemarau setelah selesai panen padi disawah bagi lahan yang dekat dengan sungai atau ada sumur mata air lainnya (sumur). Masyarakat Desa Lentu yang mayoritas bertani selain menanam tanaman pangan juga menanam tanaman hortikultura seperti, lombok. Tanaman hortikultura biasanya ditanam pada musim hujan dan kemarau, namun tidak semua masyarakat melakukan karena faktor air.

Bagi petani yang punya lahan berdejetan dengan sumber air mereka dapat menanam berbagai macam jenis tanaman jangka pendek. Sebelum melakukan penanaman umumnya didahului dengan penyiapan lahan, bibit, penanaman, perawatan tanaman dengan cara melakukan penyiram, penyiangan dan pemupukan sampai kepada pemanenan dan pengolahan pasca panen.

Namun, terjadi permasalahan ekonomi disektor pertanian yang signifikan berpengaruh dengan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang mejadi permasalahan masyarakat Lentu seperti hasil panen pertanian pada umumnya kurang optimal disebabkan kurangnya sumber air, kelompok tani masih kesulitan mendapatkan bibit unggul dan harga pupuk yang terjangkau, jalan pada Desa Lentu lumpur pada saat musim hujan sehingga menghambat proses pertanian.

2. Sektor Peternakan

Sektor peternakan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Desa Lentu dimana ternak yang dipelihara hanya ternak kecil seperti ayam, sedangkan untuk kerbau sudah tidak terlalu banyak yang dipelihara. Untuk hewan kuda masih dipelihara karena untuk dibutuhkan dtenaganya digunakan untuk membajak lahan pertanian sehingga yang dimiliki oleh warga hanya berkisar 1-2 ekor. Pada umumnya masyarakat Desa Lentu mengandangkan hewan ternaknya disekitar rumah bahkan ada yang dikolom rumah sehingga jika dilihat dari segi kesehatan lingkungan sangat terganggu karena menimbulkan aroma tak sedap terutama pada musim hujan tiba.¹³

D. Infrastruktur Sosial

1. Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Disamping itu dengan pendidikan dapat mengembangkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik dengan demikian pendidikan merupakan keharusan bagi manusia apakah itu ditempuh dengan pendidikan formal maupun non formal. Kaitan dari suatu pengembangan daerah maka pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam menciptakan tenaga-tenaga terdidik, terampil dan bertanggung jawab. Dalam proses pengembangan bangsa secara keseluruhan akan mengalami ketimpangan bila

¹³ H. Muh. Amir Situju, Wawancara, Tanggal 05 September 2016.

tidak didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai seperti gedung, tenaga pengajar dan perlengkapan pendidikan lainnya.

Pendidikan adalah merupakan faktor penentuan bagi perkembangan suatu bangsa atau Negara. Oleh sebab itu, pendidikan sangat menjadi perhatian utama bagi pemerintah di Negara baik pengadaan sarana dan prasarananya mulai dari tingkat desa maupun daerah terpencil. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto terkhususnya di Desa Lentu telah berdiri 4 buah TK, SD, MI dan SMU .

Di Desa Lentu hanya terdapat 1 buah TK, yakni TK Darmawanita Ta'binjai, dengan kondisi bangunan yang memperhatikan. Olehnya itu mulai dari gedung TK sampai alat permainannya perlu direhabilitasi sebab salah satu penyebab malasnya anak-anak untuk datang kesekolah ini karena ketidaknyamanan dengan kondisi sekolah serta alat-alat permainan yang kurang memadai sehigga anak-anak malas untuk datang kesekolah. Disamping itu masih perlu pembangunan TK minimal 2 unit karena masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan wadah dikarenakan wilayah dusun yang berjahuan seperti Dusun Alluka dan Dusun Paranga olehnya itu perlu penambahan TK di setiap dusun.

Sekolah dasar di Desa Lentu terdapat 1 unit Sekolah Dasar yaitu SD Ta'binjai dengan umlah siswa masing-masing 181 siswa dengan tenaga pengajar sebanyak 9 orang PNS dan 8 orang honorer. Secara umum kondisi sekolah sudah sangat bagus, namun secara sarana dan prasarana perpustakaan masih perlu pembenahan. Disamping itu terdapat pula 1 buah MI (Madrasah Itidaiyah) yang terletak didusun Paranga yang hanya memiliki siswa sebanyak 50 orang dengan ruang kelas hanya 3ruangan oleh karena itu masih perlu pembenahan dari segi sarana dan prasarana seperti ruang belajar dan fasilitas lainnya yang dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

Sekolah Menengah Umum di Desa Lentu terdapat 1 unit sekolah SMU yang baru dibngun dengan jumlah siswa 375 orang dengan tenaga pengajar sebagian besar hanya honorer melihat jumlah siswa yang semakin tahun semakin meningkat namun sarana dan prasarana belum memadai seperti ruang kelas yang masih kurang dan fasilitas lainnya .

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Desa Lentu masih tergolong rendah dan umumnya masyarakat hanya tamatan Sekolah Dasar. Data ini

berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Kader Perberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2007.¹⁴

Adapun keadaan pendidikan yang ada di Desa Lentu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Keadaan Pendidikan diDesa Lentu

Jenis pendidikan	Nama Dusun					Total
	alluka	Campagayyaa	Parangga	Sapayya	Ta'binjai	
Belum sekolah	30	73	55	46	67	271
Putus sekolah	46	78	89	28	74	315
SR	7	-	-	1	5	13
TK	2	6	-	11	26	45
SD	54	235	106	127	207	729
SMP	38	81	20	68	132	357
SMA	24	53	12	105	148	342
D2	-	-	-	7	3	10
D3	1	-	-	2	3	6
S1	1	6	1	5	15	28
S2	-	-	1	1	-	2

Sumber: Data hasil sensus Desa Lentu Tahun 2007-2008¹⁵

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masihlah rendah ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran bagi warga khususnya para

¹⁴ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)* Desa Lentu Kec. Bontoramba Tahun 2015. Hlm.37

¹⁵ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)*. Tahun 2011-2015. Hal.

orang tua disamping itu faktor lain disebabkan oleh karena faktor ekonomi yang masih relatif rendah.

2. Fasilitas Kesehatan

Kebersihan lingkungan adalah merupakan pangkal kesehatan. Maksudnya apabila pada suatu daerah tidak terjaga kebersihannya kemungkinan besar akan menimbulkan penyakit. Sebaliknya apabila pada suatu daerah terjaga kebersihannya kemungkinan besar tidak terdapat penyakit.

Pembangunan kesehatan merupakan suatu bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta kesejahteraan lahir dan batin. Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberi pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata.

Sarana Pelayanan Kesehatan di Desa Lentu terdapat satu unit puskesmas yang berasal dari dinas kesehatan Kabupaten Jeneponto. Selain itu ibu hamil dan bersalin mendapat pelayan yang memadai dari 2 orang desa. Masyarakat yang menggunakan jasa bidan yaitu dusun Ta'binjai dan Dusun Sapaya, sementara 3 dusun lainnya lebih mudah mengakses puskesmas yang berada di Ibu Kota Kecamatan. Masyarakat desa juga masih menggunakan jasa dukun atau bidan lokal yang masih menggunakan keterampilan lokal.¹⁶

Masalah kesehatan juga sangat berpengaruh pada sumber air bersih. Masyarakat Desa Lentu masih sangat mengalami masalah air bersih apalagi pada saat datang kemarau dikarenakan masih banyak masyarakat yang mendapatkan air

¹⁶ Sri Wahyuni Amd,Kep. Wawancara, Tanggal 05 September 2016.

bersih pada sumur umum yang pada saat musim kemarau harus mengantri karena masih sangat kurangnya sumur yang dapat melayani kebutuhan warga.

Tabel 3.3 Akses Masyarakat Pemanfaatan Sumber Air Bersih

Nama Dusun	Sumur biasa/ umum	Sumur bor	Tidak punya sumur	Sumur umum pribadi
Alluka	58	-	-	2
Campagayya	133	4	-	18
Paranga	99	5	1	-
Sapayya	110	-	1	12
Ta'binjai	135	12	-	48
Jumlah	535	21	2	80

Sumber : data dari hasil sensus Desa Lentu Tahun 2007-2008¹⁷

Secara umum, semua rumah tangga di Desa Lentu tidak memiliki saluran pembuangan air limbah dan hanya membiarkan air limbahnya mengalir dibawah dapur. Untuk limbah padat , umumnya dibuang disekitar rumah kemudian dibakar. Penggunaan dan kepemilikan jamban keluarga di Desa Lentu sangat memprihatinkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran warga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah. Umumnya masyarakat membuang hajat ditempat terbuka seperti disawah, kebun saranan irigasi atau disungai. Jumlah ini diperkirakan sekitar 10% dari 646 KK. Pemanfaatan sungai sebagai empat membuang limbah manusia ketika musim hujan sebab sawah dan kebun telah ditanami tanaman sehingga warga harus kesungai. Umumnya ini dilakukan masyarakat pada musim kemarau. Dimusim hujan, warga menumpang dijamban tetangga. Hal ini terjadi karena selain faktor kesadaran akan pentingnya hidup

¹⁷ RPJMD. Desa Lentu Kecamatan Kabupaten Jeneponto, Tahun 2011-2015, Hlm 45

bersih dan sehat juga disebabkan karena ketidak mampuan menyediakan sarana tersebut.

Tabel. 3.4 Kepemilikan Jamban Keluarga Masyarakat Desa Lentu

Nama Dusun	Kepemilikan Jamban Keluarga			
	WC. Pemanen	Tidak punya	WC. Umum	WC. Biasa
Alluka	-	55	-	5
Campagayya	-	128	5	8
Paranga	8	96	-	1
Sapayya	8	102	-	14
Ta'binjai	12	129	-	46
Jumlah	28	510	5	74

Sumber : data hasil sensus Desa Lentu Tahun 2007/2008¹⁸

Dengan melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Lentu masih banyak belum mempunyai kesadaran dengan kebersihan lingkungan sekitar ini terlihat bahwa 510 KK masih belum mempunyai jamban. Ini menyebabkan masyarakat sering menderita penyakit demam dan diare yang sering terjangkit pada saat musim pancaroba.

3. Sarana Transportasi

Jalan adalah merupakan sarana perhubung yang penting dalam setiap aktivitas kehidupan manusia. Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap arus transportasi atau perhubungan, oleh sebab itu kondisi jalan perlu mendapat perhatian dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun unsur masyarakat setempat. Secara umum jalan di Desa Lentu dalam kondisi baik. Jalan desa yang

¹⁸ RPJMD. Desa Lentu Kecamatan Kabupaten Jeneponto, Tahun 2011-201. Hlm 53

dulu diaspal saat ini sudah mengalami kerusakan akibat selalu digenangi air pada musim hujan. Hal ini terjadi karena tak ada talud jalan, tak ada solokan. Pembangunan jalan pada Desa Lentu khususnya Dusun Campagayya-Paranga telah mengalami perbaikan pada tahun 2002 masa pemerintahan Bakhtiar Patau. Perbaikan jalan tidak secara keseluruhan diperbaiki oleh pemerintah daerah. Namun pemerintah desa tetap berusaha untuk memperbaiki akses jalan yang ada di Desa Lentu dengan cara pengerasan jalanan yang benar-benar rusak dan tidak dapat dilewati kendaraan roda dua.

Drainase yang sudah dibangun kurang terpelihara dan kualitas bangunan yang lemah menyebabkan drainase cepat rusak. Jembatan di Desa Lentu terdapat 3 buah jembatan dalam kondisi baik dan tetap membutuhkan pemeliharaan, pembangunan jembatan gantung Alluka pada tahun 2009.

Untuk menghindari kerusakan badan jalan dan mengurangi volume air yang menggenangi jalan perlu pembuatan drainase secara permanen sepanjang desa. Sehingga mampu memperlancar aliran air. Di Desa Lentu hampir semua dusun memiliki drainase namun belum secara keseluruhan.

4. Alat Transportasi

Alat transportasi adalah merupakan faktor penting dalam menunjang kehidupan setiap manusia. Dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Lentu menggunakan beberapa jenis alat transportasi seperti sepeda motor, bendi dan mobil. Penunjang alat transportasi ini didukung dengan tersedianya ruas jalan yang sudah diperbaiki oleh pemerintahan.

Sarana angkutan umum yang tersedia di Desa Lentu terdiri dari mobil mikrolet, bendi, dan beberapa motor ojek sebagai sarana angkutan umum, sebagian masyarakat memilih motor pribadi tapi kerap kali dijadikan sebagai sarana transportasi umum (ojek). Kendaraan mobil hanya mampu beroperasi 2 sampai 3 kali sehari, sedangkan transportasi ojek beroperasi setiap saat. Dengan lancarnya transportasi hasil-hasil bumi dapat dijual sendiri keluar desa dan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat sudah mudah diperoleh karena banyak penjual-penjual masuk ke desa. Mobil mikrolet dan bendi beroperasi didalam desa setiap hari apalagi pada saat hari pasar.

BAB IV

DAMPAK TERBENTUKNYA DESA LENTU KECAMATAN

BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO PADA MASYARAKAT

UMUMNYA & MASYARAKAT PADA KHUSUSNYA

A. Bagi Masyarakat Desa Lentu

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak terlepas dengan sistem pemerintahan desa yang mengalami perubahan mendasar sebagai implikasi dari implementasi Undang-Undang tersebut. Berkenaan dengan itu pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dijelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah kabupaten. Dengan demikian desa memiliki defenisi yang berbeda dengan pengertian desa yang terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.¹

¹ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Tahun 2015. Hlm 38.

Otonomi luas yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah memberi kesempatan yang sangat terbuka dalam upaya pembentukan, penggabungan, penghapusan serta perubahan status desa menjadi kelurahan. Artinya pemerintah daerah dapat membentuk atau menghapuskan desa dengan berbagai pertimbangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

Sistem sentralisasi pemerintahan yang sempat berjalan selama beberapa dekade dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia membawa dampak yang cukup luas dalam perkembangan desa sebagai tingkat pemerintahan yang paling rendah. Pemerataan pembangunan yang tidak terlaksana dengan baik menimbulkan disparitas antara daerah yang satu dengan daerah lain khususnya menyangkut kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan penerapan otonomi daerah timbul ide dan gagasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk rumah tangga desa sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun demikian disparitas antara desa yang satu dengan desa yang lain dalam satu kabupaten tetap menjadi isu utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian wacana untuk pembentukan desa baru dimunculkan sebagai satu solusi dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga kesenjangan dapat segera diatasi dan diharapkan masyarakat dalam desa yang baru dibentuk beranjak dari keterpurukan dengan asumsi pembangunan yang lebih merata.²

Disamping itu, luas wilayah yang menjadi cakupan suatu desa menjadi alasan yang cukup kuat dalam pembentukan suatu desa. Wilayah desa yang

² *Ibid*, Hlm 76.

terlalu luas secara langsung memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan program-program pembangunan desa. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk desa kurang memberikan kontribusi bagi masyarakat mengingat luasnya jangkauan wilayah desa yang harus dibanahi. Oleh karena itu aspirasi masyarakat berkembang untuk mengusulkan pembentukan desa dengan harapan wilayah desa yang baru dibentuk akan lebih efisien menyerap dana yang dialokasikan dalam pembangunan desa.

Rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh menjadi salah satu faktor pendorong yang melahirkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan suatu desa. Upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat semakin gencar disuarakan mengingat masih besarnya ketergantungan masyarakat akan layanan pemerintah. Jarak yang terlalu jauh menuju pusat pemerintahan desa untuk mendapatkan jasa dan pelayanan pemerintah serta birokrasi yang terlalu panjang dipandang sebagai suatu masalah yang menyebabkan lambannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Solusinya adalah dengan melakukan pembentukan desa baru, masyarakat sebagai pelanggan lebih dekat dengan pemberi layanan dan berharap mendapat pelayanan prima yang nantinya akan berdampak positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor lain yang menjadi alasan pembentukan desa baru adalah kesamaan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Dengan adanya kultur dan budaya masyarakat yang relatif sama dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan suatu desa. Dalam hal ini pelestarian nilai-nilai budaya dapat dilaksanakan dan berpengaruh secara langsung dalam pengaturan tatanan

kehidupan masyarakat desa. Artinya adat istiadat serta budaya masyarakat dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.³

Asumsi dan penjelasan diatas tidak serta merta menjadi pikiran pokok dalam pembentukan desa. Dibutuhkan pedoman dan persyaratan untuk melakukan pembentukan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Adapun pertimbangan pokok dan ketentuan persyaratan pembentukan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk desa yang akan dibentuk paling sedikit 1.000 jiwa
2. Jumlah rumah tangga pada desa yang akan dibentuk paling sedikit 200 kepala keluarga
3. Luas cakupan wilayah desa yang akan dibentuk.
4. Adat istiadat masyarakat setempat

B. Bagi Pemerintahan Kecamatan & Kabupaten

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah

³ H. Amir Situjuh. Wawancara, Tanggal 05 September 2016.

menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.⁴

Interaksi antara dua atau lebih daerah yang berbeda akan berpengaruh pada masing-masing wilayah sehingga akan memicu terjadinya perubahan. Seberapa besar perubahan yang terjadi tergantung dari jarak, jumlah penduduk, dan berbagai factor pendukung lainnya seperti sarana transportasi, komunikasi, listrik, dan lain sebagainya.

Penggunaan kata kontribusi sudah cukup banyak dipakai didalam kalangan masyarakat luas, dimana kata ini tidak hanya dikenal didalam kalangan tertentu saja. Namun didalam penggunaannya, kata kontribusi tidak selalu merujuk kepada sebuah benda (uang) saja, namun hal ini juga bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang mana bila ditambahkan awalan dan akhiran tertentu maka kata kontribusi akan memiliki arti yang sangat berbeda dari pengertian diatas.⁵

Desa Lentu merupakan suatu pemerintahan. Oleh karena itu kontribusi yang diberikan kepada masyarakat adalah kontribusi pemerintahan, Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut

⁴Baktiar Patau. Wawancara, Tanggal 05 September 2016.

⁵http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-n-kontribusi/&ei=vfdtMB_3&lc=id, Diakses Tanggal 27 September 2016, Pukul 14:25.

memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.⁶

Selain pembangunan fisik, pihak pemerintah desa juga dituntut memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah desa terhadap masyarakat yaitu pelayanan pembuatan persurata, pengurusan KTP, pengurusan KK, menjadi penengah permasalahan dikalangan masyarakat, pengurusan penerimaan bantuan keluarga tidak mampu sekaligus menentukan yang berhak mendapatkan bantuan, dan penyaluran modal usaha untuk masyarakat.

B.Sarana dan Prasarana Umum

Semenjak terbentuknya desa ini, banyak perubahan yang terjadi terutama dalam pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan tanah, jalan umum, pembangunan pos kamling, pembuatan saluran air perkampungan, pembuatan puskesmas, pembuata Sekolah TK, dan perbaikan gedung Sekolah SD.

Pembangunan dalam bentuk fisik ini, tidak serta merta langsung bisa dibangun secara bersamaan. Tetapi memerlukan waktu bertahun-tahun sehingga semuanya mampu dibangun, pembangunan ini suda dimulai dari awal terbentuknya desa ini seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

⁶H. Mustari Kr. Lallo. Wawancara, Tanggal 05 September 2016.

Pembangunan sebenarnya bukanlah bertumpu pada meningkatnya produksi, tetapi pembangunan seharusnya juga berpusat pada manusia. Karena apapun strategi dan taktik dalam pembangunan, apabila rakyat tidak memiliki dasar yang kuat maka alat sekomplit dan secanggih apapun strategi pembangunan tidak akan berjalan. Maka dari potensi manusia harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu mengelolah sumber daya alam yang ada disekitarnya.

Berbagai rencana program dilaksana oleh pemerintah Desa Lentu untuk melakukan pembangunan yaitu meningkatkan pendidikan bagi masyarakatnya, partisipasi masyarakat dalam hal swadaya serta kegotong royongan yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan. Keaktifan masyarakat dalam pembangunan Desa Lentu merupakan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk membangun Desa Lentu lebih maju dan terkemuka.⁷

Pembangunan ini diadakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat itu serta kebijakan pemerintahan yang menjabat. Pembangunan ini mampu terlaksana juga dikarenakan dana yang disalurkan oleh pihak pemerinta untuk melaksanakan pembangunan baik dana dari APBN dan APBN.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Lentu, maka diperlukan arah kebijakan pembangunan desa, program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran, serta strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dan program adalah dengan

⁷*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Tahun 2015.

memadukan secara harmonis penyelenggaraan tugas-tugas aspek pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.⁸

Oleh karena itu strategi yang dilakukan dalam pembangunan desa adalah:

1. Menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan instansi-instansi terkait;
2. Menjalin kerjasama antara lembaga pelaksana program yang akan masuk ke desa dengan semua pihak;
3. Kader-kader Lokal (KPM), bersama masyarakat dan pemerintah desa harus bekerjasama dengan baik dalam melakukan program yang ada hubungannya dengan pembangunan di desa.
4. Membuat proposal sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam mendapatkan program dari luar desa.

Pembangunan sebenarnya bukanlah bertumpu pada meningkatnya produksi, tetapi pembangunan seharusnya juga berpusat pada manusia. Karena apapun strategi dan taktik dalam pembangunan, apabila rakyat tidak memiliki dasar yang kuat maka alat sekomplit dan secanggih apapun strategi pembangunan tidak akan berjalan. Maka dari potensi manusia harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu mengelolah sumber daya alam yang ada disekitarnya.

Berbagai rencana program dilaksana oleh pemerintah Desa Lentu untuk melakukan pembangunan yaitu meningkatkan pendidikan bagi masyarakatnya, partisipasi masyarakat dalam hal swadaya serta kegotong royongan yang

⁸ *Ibid*, Hlm 49

dilakukan masyarakat dalam pembangunan. Keaktifan masyarakat dalam pembangunan Desa Lentu merupakan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk membangun Desa Lentu lebih maju dan terkemuka.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting dalam pembangunan. Ada empat hal penting dalam partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan atau perencanaan
2. Partisipasi dalam perencanaan
3. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil
4. Partisipasi dalam mengevaluasi

Dari keempat partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah diperaktekkan dalam masyarakat Desa Lentu dalam pembangunan seperti pembangunan jalan, pendidikan dan pembangunan tempat ibadah. Seperti pembangunan jalan masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan dan perencanaan dengan cara swadaya. Pada tahun 2013 dalam pembangunan sudah nampak adanya perubahan baik itu segi fisik, ekonomi, maupun sumber daya manusia.⁹

⁹http://googleweblight.com/?lite_url=http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/6723&ei=Mj9pwIPQ&lc=id-, Diakses Tanggal 27 September 2016, Pukul 13:00

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Desa Lentu merupakan salah satu desa keturunan Raja/Karaeng yang melantik karaeng yang ada di Kabupaten Jeneponto dikecamatan Bontoramba. Desa Lentu dibentuk pada tahun 1991, pemekaran di Kelurahan Bontoramba. Pemekaran Kelurahan Bontoramba ini bertujuan untuk mengembangkan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik serta percepatan pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
2. Perkembangan Desa Lentu dari tahun 1991-2015 mengalami perubahan baik dari system pemerintahan, jumlah pemukiman, penduduk serta meningkatnya infrastruktur sosial yang ada di Desa Lentu seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kondisi jalan, transportasi, komunikasi dan listrik. Selain infrastruktur mengalami peningkatan perekonomian masyarakat Desa Lentu mengalami peningkatan karena didukung dengan dibangunnya infrastruktur.
3. Seiring dengan pembentukan desa dan perkembangan yang ada di Desa Lentu memberi dampak positif bagi kemajuan masyarakat. Karena dengan terbentuknya Desa Lentu maka pemerintah setempat melakukan pembangunan yaitu meningkatkan pendidikan bagi masyarakatnya, partisipasi masyarakat dalam hal swadaya serta kegotong royongan yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan.

B. Implikasi

1. Sebagai acuan bagi pemerintah untuk lebih mengembangkan Desa Lentu.
2. Sebagai bahan evaluasi masyarakat terhadap perkembangan yang dialami masyarakat Desa Lentu.

3. Saran

Sebagai akhir dari penelitian yang berjudul Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto (1991-2015), maka adapun saran yang dapat penulis berikan yakni:

1. Untuk membuat Desa Lentu menjadi desa yang lebih baik maka diperlukan fasilitas ekonomi dan perdagangan ditingkatkan seperti pasar, pusat bisnis untuk mengakselerasi rona perekonomian, meningkatkan aktivitas penduduk mengelola dan mengembangkan usaha, melakukan transaksi, memaparkan produk dan barang-barang kebutuhan primer, sekunder dan tersier.
2. Kepada pemerintah setempat agar bersedia memberikan penyuluhan bimbingan dan informasi yang berguna bagi pengembangan Desa Lentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Lentu Kec. Bontoramba. 2015
- Pamudji, MPA. 1982. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Adisasmita. 2001. *Perencanaan Pembangunan Perdesaan Menggunakan Pendekatan Partipasif*. Jakarta Selatan: Gagas Media.
- Alip Madya. 2009. *Fenomena Terbentuknya Kampung Kota oleh Masyarakat Pendatang Spontang*. Medan: CV. Surya Putra Panca Mandiri.
- Yamin Muhammad, Dkk. 1990. *System Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Laila Sabeita El Fitri, dkk. Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Malang: Universitas Brawijaya, Volume 1 No. 3.
- Jeddawi Murtir. 2009. *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Salman Darmawan. *Sosiologi Desa Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*, Makassar: Inninawa.
- Budiarjo. 1997. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Bandung: Yrama Widya.
- Tumpal P. Saragi. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*. Jakarta: CV. Ciprui.
- Harry Waluyo. 1986. *Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah.
- Djujuk Juyoto, Nung Runua. 1993. *Pemimpin Bangsa Masa Depan*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Mashuri Maschab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Rahman Hamid, Abdul dan Saleh Madjid, Muhammad. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Kecamatan Botoramba dalam Angka 2014. BPS Kabupaten Jeneponto.

Navian Zaidan. *Manajemen Pemerintahan*. Depok: PT Rajagrafinda Persada.

Prof. Drs. Haw. Widjaja. 2014. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ismawati Esti. 2012. *Ilmu sosial budaya dasar*. Makassar: Ombak.

Syafiie Kencana Inu. 2008. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Perca.

Tabagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Peradaban.

Haw Widjaja. 2012. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Sumber Internet

http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kontribusi/&ei=vfdtMB_3&lc=id, Diakses Tanggal 27 September 2016, Pukul 14:25.

http://googleweblight.com/?lite_url=http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/6723&ei=Mj9pwIPQ&lc=id-, Diakses Tanggal 27 September 2016, Pukul 13:00

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Baktiar Patau
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ta'binjai

2. Nama : Muh. Abbas Mile
Umur : 64 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Ta'binjai

3. Nama : H. Mustari Kr. Lallo
Umur : 79 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Sapayya

4. Nama : Hj. St. Sarbiah
Umur : 109 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Ta'binjai

5. Nama : H. Amir Situju
Umur : 72 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Ta'binjai

6. Nama : Sri Wahyuni Amd,Kep
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Bidan
Alamat : Tabinjai

7. Nama : Andi Baso
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Manjangloe

LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar Tel. 885105

USULAN JUDUL SKRIPSI

A. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : LOLA VITALOKA
NIM : 1262042010
Program Studi : Strata Satu (S1)
Jurusan : Pendidikan Sejarah
Alamat : Jl. Kacong Dg Lalang N0.25 C

B. JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 1991-2015
2. Otonomi Daerah Kabupaten Jeneponto 1991-2015
3. Pasar Sentral Karisa Jeneponto 1991-2015

C. JUDUL YANG DITERIMA

Desa Lentu kec. Bontoramba kab. Jeneponto 1991-2015

Makassar, 18 Januari 2016

Disetujui Oleh :
Penasihat Akademik

Dr. Patahuddin, M.Pd
NIP. 19641231 199003 1 003

Yang Mengusulkan

Lola Vitaloka
NIM. 1262042010



Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah

Dr. Patahuddin, M.Pd
NIP. 19641231 199003 1 033

Lampiran 2



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan : A.P. Pettarani Makassar

Laman : FIS_UNM@unm.ac.id

Nomor : 5573/UN36.6/DL/2016

26 September 2016

Lamp. : -

Hal : Pengesahan Judul Skripsi
dan Pembimbing

Yth. : Sdr. **Lola Vitaloka**
di Makassar

Stambuk : 1262042010

Berdasarkan surat permohonan Saudara tertanggal 26 September 2016 perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat ini, maka dengan ini disampaikan dengan hormat kepada Saudara bahwa rencana skripsi berjudul:

Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto (1991-2015).

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Patahuddin, M.Pd.
2. Drs. H. Muh. Saleh Madjid, M.Pd.

Dapat disetujui dan dinyatakan SAH.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dipergunakan seperlunya.


Dekan Bidang Akademik,
Dr. Firman Umar, M.Hum.
NIP 196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan Pend. Sejarah

Lampiran 3



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan : A.P. Pettarani Makassar

Laman : FIS_UNM@unm.ac.id

Nomor : 5574/UN36.6/PI/2016

26 September 2016

Lamp. : -

Hal : Permintaan Izin Melaksanakan
Penelitian

Yth. : **GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

Dimohon dengan hormat kiranya kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini, dapat diberikan izin mengadakan penelitian di: **Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto** dalam rangka penulisan skripsi.

N a m a : **Lola Vitaloka**

S t a m b u k : 1262042010

Jurusan/Program Studi : Pend. Sejarah

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Patahuddin, M.Pd.

2. Drs. H. Muh. Saleh Madjid, M.Pd.

Masalah yang diteliti :

Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto (1991-2015).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan Pend. Sejarah

Lampiran 4




1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 1 3 5 6 8

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 (UPT - P2T)

Nomor : 13212/S.01P/P2T/09/2016 KepadaYth.
 Lampiran : Bupati Jeneponto
 Perihal : Izin Penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Pembantu Dekan Bid. Akademik FIS UNM Makassar Nomor : 5574/UN36.6/PL/2016 tanggal 26 September 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : L O L A V I T A L O K A
 Nomor Pokok : 1262042010
 Program Studi : Pend. Sejarah
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. AP. Pettarani, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" DESA LENTU KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO (1991-2015) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 September s/d 28 Oktober 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 28 September 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
 Rangkap : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
 1. Pembantu Dekan Bid. Akademik FIS UNM Makassar di Makassar;
 2. Peringgal.

SIMAP BKPMO 28-09-2016

Lampiran 5



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KANTOR PELAYANAN TERPADU
 Jalan Lingkar No. 30 Bontosunggu Telp. (0419) 22561 Kode Pos 92311

Jeneponto, 04 Oktober 2016

Nomor : 0295/IPT/KPT/IP/X/2016
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Desa Lentu
 Kecamatan Bontoramba
 Di,-
 Tempat

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 13212/S.01.P/P2T/09/2016, Tanggal 28 September 2016, Perihal Izin Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Saudara bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Lola Vitaloka**
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Pokok : 1262042010
 Program Studi : Pendidikan Sejarah
 Lembaga : Universitas Negeri Makassar
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Ta'binjai, Desa Lentu, Kec. Bontoramba, Jeneponto

Bermaksud melakukan penelitian dan pengambilan data awal di daerah Bapak/Saudara, sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul :

"Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto (1991-2015"

yang berlangsung tanggal : 04 Oktober s/d 04 November 2016

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Jeneponto.
2. Penelitian tidak menimbulkan dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Jeneponto.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
 Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan


SUHARTINI ANGKASAWATI TOMPO, SE
 Pangkat : Penata
 NIP : 19850911 200902 2 008

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jeneponto (*dikirim sebagai laporan*)
2. Pembantu Dekan Bid. Akademik FIS UNM Makassar;
3. Kepala Kecamatan Bontoramba;
4. Pemohon yang bersangkutan;
5. Pertinggal,-

Lampiran 6



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BONTORAMBA
DESA LENTU

SURAT KETERANGAN
NOMOR 72/DL/BTR/X/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baktiar Patau
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : Lola Vitaloka
Tempat meneliti : Ta'binjai Desa Lentu / Stambuk 1262042010
Meneliti tentang **"Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto (1991-2015)"**

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan penelitian tentang Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto sejak tanggal 05 September 2016 s/d 30 September 2016.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai keinginan tugas penelitian.

Dikeluarkan di: Tabinjai
Pada tanggal : 30 Sep 2016
Mengetahui
Kepala Desa



BAKTIAR PATAU

Lampiran 7



Dokumen-dokumen Foto Penelitian



Gambar 1. H. Mustari Kr. Lallo sebagai kepala desa persiapan pada tahun 1991-1992, dokumentasi Novi tanggal 10 september 2016.



Gambar 2. Hj. St. Sarbiah (Kepala Desa Definitif pertama Desa Lentu 1993-2000), dokumentasi Iin Parlina Patau, tanggal 05 september 2016.



Gambar 3. H. Amir Situju (Mantan kejaksaan Jenepono & mantan ketua BPD serta suami dari Hj. St. Sarbiah), dokumentasi Novi tanggal 05 September 2016.



Gambar 4. Baktiar Patau (kepala Desa Lentu sekarang), dokumentasi Iin Parlina Patau tanggal 10 september 2016.



Gambar 5. Drs. Abbas Mile, S.Ag (Sekretaris Desa Lentu 2007-sekarang), dokumentasi Iin Parlina Patau tanggal 05 september 2016.



Gambar 6. Sri Wahyuni Amd.Keb (Bidan Poskesdes Desa Lentu), dokumentasi Iin Parlina Patau tanggal 05 September 2016.



Gambar 7. Kantor Desa Lentu (Dalam proses perbaikan), dokumentasi Lola Vitaloka tanggal 05 september 2016.



Gambar 8. Rapat BPD di kantor Desa Lentu, dokumentasi Lola Vitaloka tanggal 05 september 2016.



Gambar 9. Poskesdes didusun Moci Desa Lentu, dokumentasi Lola Vitaloka tanggal 05 September 2016.



Gambar 10. TK/TPA didusun Ta'binjai Desa Lentu, dokumentasi Lola Vitaloka tanggal 05 September 2016.



Gambar 11. Rumah peninggalan Toddo Appaka Lentu, dokumentasi Novi tanggal 05 september 2016.



Gambar 13. Mesjid Patau Toddo Lentu di dusun Ta'binjai Desa Lentu yang sementara dibangun, dokumentasi Lola Vitaloka tanggal 05 september 2016.



Gambar 14. SDN 29 Ciniyo didusun Moci Desa Lentu, dokumentasi Lola Vitaloka tanggal 05 september 2016.



Gambar 15. Pondok Pesantren Baitullah didusun Paranga Desa Lentu, dokumentasi Lola Vitaloka tanggal 05 september 2016.



Gambar 16. SMAN 1 Bontoramba didusun Campagayya Desa Lentu, dokumentasi Lola Vitaloka tanggal 05 september 2016.



Gambar 17. Kantor BKPM Makassar, dokumentasi Ariesta Adepati tanggal 26 September 2016.



Gambar 18. Pegawai kantor Camat Bontoramba, dokumentasi Ibu Marwah tanggal 15 September 2016.

RIWAYAT HIDUP



Lola Vitaloka, lahir di Jeneponto pada tanggal 10 Juni 1994. Anak ke empat dari lima bersaudara pasangan dari Baktiar Patau dan St. Rabiah. Pendidikan pertama diperoleh di TK Lentu pada tahun 1998 dan tamat pada tahun 2000. Pada tahun yang sama melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 29 Ciniayo dan tamat pada tahun 2006.

Pada tahun yang sama melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Tamalatea dan tamat pada tahun 2009. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan SMKN 1 Jeneponto dan tamat pada tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Makassar pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial.